



- X @KEMENKESRI
- IG @KEMENKES_RI
- YT KEMENTERIAN KESEHATAN RI
- WE SEHATNEGERIKU.KEMKES.GO.ID
- FB KEMENTERIAN KESEHATAN RI
- RS RADIOKESEHATAN.KEMKES.GO.ID

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**BIRO KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK**

SEMESTER I

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

20
25



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester I Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan wujud implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dengan tujuan untuk mencerminkan komitmen Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mewujudkan akuntabilitas yang merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana kinerja yang telah dicapai selama periode ini. Hal tersebut menjadi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam memahami proses dan capaian yang telah diraih serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penciptaan inovasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.

Jakarta, Juni 2025
Kepala Biro Komunikasi dan
Informasi Publik



Aji Muhawarman, ST, MKM
NIP. 197712122002121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berada di bawah tanggung jawab Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja mendukung Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan nomenklatur tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan menyelenggarakan fungsi; a) pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko dan indeks kepuasan masyarakat terhadap berita dan publikasi kesehatan; b) pengelolaan publikasi kesehatan di media konvensional dan digital; c) pelaksanaan liputan dan dokumentasi program dan kebijakan kesehatan; d) pengelolaan layanan informasi, keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat; e) koordinasi penguatan pelayanan publik dan kepatuhan standar perilaku interaksi layanan publik; f) pengelolaan komunikasi internal dan eksternal, serta sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; g) pengelolaan perpustakaan; h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan i) pelaksanaan urusan administrasi biro. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut juga mengatur bahwa Organisasi Tata Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Biro Komunikasi dan Informasi Publik) terdiri dari; a) Kepala Unit Kerja; b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan c) Kelompok Jabatan Pelaksana

Ringkasan Tingkat Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja di Biro Komunikasi dan Informasi Publik dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2025 yang didasari oleh Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2020-2024 dikarenakan hingga saat ini Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2025-2029 belum ditetapkan. Adapun berdasarkan dokumen tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik bertanggungjawab atas 2 (dua) target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: (1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi; (2) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TA 2025	
		TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	0
	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	0

Hingga saat ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik belum dapat merealisasikan kegiatan yang direncanakan karena adanya perubahan indikator kinerja yang masih dalam proses pengesahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025–2029 sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
		TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	77	0
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	0
	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	0

**data realisasi Bulan Januari s.d. Juni 2025*

Di sisi lain, peningkatan kualitas kinerja unit kerja dapat dilihat dari berbagai apresiasi yang diterima dalam bidang komunikasi dan informasi publik sampai dengan semester I adalah sebagai berikut:

a. Penghargaan Gold Winner Kategori Pelayanan Publik

Dalam penghargaan Makaravox PR Award yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia, Kementerian Kesehatan menjadi Gold Winner dalam sektor Pelayanan Publik



b. Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Kesehatan bersama dengan 4 (empat) kementerian lainnya mendapatkan penghargaan sebagai instansi teraktif dalam mengamplifikasikan narasi tunggal pada media sosial resmi instansi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I: PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur.....	7
C. Struktur Organisasi.....	7
BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Perencanaan Kinerja.....	15
B. Perjanjian Kinerja 2024.....	22
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Capaian Kinerja (3 Tahun Terakhir).....	28
1. Definisi Operasional Indikator.....	29
2. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Indikator.....	39
B. Analisis Capaian Kinerja.....	92
1. Hal yang mempengaruhi pencapaian target.....	92
2. Permasalahan.....	92
3. Pemecahan Masalah.....	93
4. Rencana Tindak Lanjut.....	93
C. Inovasi Kinerja.....	93
D. Sumber Daya/Realisasi Anggaran.....	95
1. Sumber Daya Manusia.....	95
2. Sumber Daya Anggaran.....	103
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	106
E. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	111
BAB IV: KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Tindak Lanjut.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A) Latar Belakang

Dewasa ini, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi elemen krusial dalam meraih tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang terus digalakkan di berbagai sektor pemerintahan. Sistem ini mengedepankan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-based management*) yang menekankan pada hasil yang dapat diukur dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat, sehingga penerapan sistem ini tidak hanya berguna untuk pengukuran kinerja tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Pendekatan ini mengharuskan instansi untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang nantinya akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi aspek efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Di era digital dan keterbukaan informasi ini, kebutuhan akan transparansi kinerja sangat mendesak. Masyarakat berekspektasi agar setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Masyarakat menginginkan adanya bukti nyata mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara serta dampak positif yang dihasilkan dari setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Tanpa transparansi, ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan akan terus berkembang, sehingga dapat berimbas pada penurunan partisipasi publik.

Berdasarkan hal tersebut telah dikembangkan media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan RI. Pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 ditetapkan visi, misi, tujuan dan strategi baru yang didasarkan pada perubahan struktur organisasi, fokus pada sasaran prioritas nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDG's). Salah satu program generik yang mewadahi kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal adalah Program Dukungan Manajemen. Sasaran program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Dalam Rencana Strategis baru, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki saatu Indikator Kinerja Program (IKP) yang berbunyi "Indikator Kinerja Pelanggan Kementerian Kesehatan" dan dua Indikator

Kinerja Kegiatan yaitu: (1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal; dan (2) Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan.

B) Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa tugas Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di kesehatan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Adanya peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan selanjutnya menata atau menyesuaikan nomenklatur organisasi, tugas, dan fungsinya.

Dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada pasal 25 disebutkan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan menyelenggarakan fungsi: a) pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi, komunikasi risiko dan indeks kepuasan masyarakat terhadap berita dan publikasi kesehatan; b) pengelolaan publikasi di media konvensional dan digital; c) pelaksanaan liputan dan dokumentasi program dan kebijakan kesehatan; d) pengelolaan layanan informasi, keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat; e) koordinasi penguatan pelayanan publik dan kepatuhan standar perilaku interaksi layanan publik; f) pengelolaan komunikasi internal dan eksternal serta sinergi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah; g) pengelolaan perpustakaan; dan h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan i) pelaksanaan urusan administrasi Biro. Peraturan ini juga mengatur mengenai Organisasi Tata Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari: a) Kepala Unit Kerja; b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan c) Kelompok Jabatan Pelaksana.

C) Struktur Organisasi

Merujuk pada peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan rentang kendali dalam operasional pelaksanaan kegiatan, maka dibentuklah tim kerja pada setiap unit kerja. Setiap tim kerja dipimpin oleh seorang ketua, sedangkan untuk jumlah anggota tidak ada pembatasan. Tim kerja yang dibentuk mempunyai tugas yaitu: 1) Menyusun perencanaan Tim kerja; 2) Melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja; 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim; 4) Menyusun laporan kegiatan Tim; dan 5) Melakukan koordinasi antar tim kerja dalam pekerjaan insidental/penugasan

Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025



Di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik ditetapkan 9 (sembilan) Tim Kerja dengan lingkup tugas sebagai berikut:

1. TIM KERJA STRATEGI KOMUNIKASI

LINGKUP TUGAS

Penyusunan strategi komunikasi kebijakan/program kesehatan, pengelolaan isu publik dengan melakukan media monitoring baik media massa maupun media sosial secara berkala, *agenda setting*, penyelenggaraan *media coaching* bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, penguatan kapasitas komunikasi risiko pada krisis kesehatan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi Kementerian Kesehatan.

2. TIM KERJA PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI

LINGKUP TUGAS

Peliputan dan dokumentasi bagi Pimpinan Kemenkes (Menteri, Wamen, Sekjen dan DWP/SERUNI), produksi video dan naskah *taping* bagi pimpinan Kemenkes, produksi video kebijakan dan program kesehatan, membuat konten infografis *vcard/greeting* bagi Pimpinan Kemenkes, sosialisasi kegiatan Kemenkes melalui menyedia *display* foto secara periodik, produksi rilis berita program kesehatan, pengelolaan *website* Sehat Negeriku

3. TIM KERJA PUBLIKASI MEDIA

LINGKUP TUGAS

Sosialisasi program dan edukasi kesehatan, penerbitan majalah Kemenkes (Mediakom), pengelolaan Siaran Radio Kesehatan, pengelolaan *Podcast* Kemenkes

(Kemencast), pengelolaan media sosial Kemenkes, produksi konten media sosial terkait edukasi kesehatan, publikasi *paid media* melalui advertorial dan *talkshow*, penyusunan Buku Kinerja Kementerian Kesehatan

4. TIM KERJA HUBUNGAN MEDIA DAN KELEMBAGAAN

LINGKUP TUGAS

Penyelenggaraan konferensi pers atau *media briefing* serta peliputan kegiatan Kemenkes dengan para jurnalis/media, media visit ke perusahaan pers, pelaksanaan media coaching bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, penyiapan bahan pimpinan (*talking point/briefing sheet*) terkait audiensi, koordinasi dan fasilitasi rohaniawan, koordinasi dan fasilitasi eksternal Kementerian/Lembaga/Organisasi non-pemerintah lainnya, fasilitasi kegiatan DPR (Raker, RDP, Kunjungan Kerja dan Sosialisasi GERMAS), monitoring setiap bulan tindak lanjut Raker/RDP ke unit terkait, koordinasi dan fasilitasi pembinaan wilayah provinsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik

5. TIM KERJA PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan informasi (pojok info, HK, ULT, penayangan *signage* di lingkungan Kementerian Kesehatan), pengelolaan pengaduan masyarakat (unjuk rasa, Ombudsman, SP4N-LAPOR, dan media sosial pengaduan), penanggungjawab dalam penilaian kepatuhan standar layanan publik oleh Ombudsman, pengelolaan dan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, penyelenggaraan pemberian penghargaan terkait pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6. TIM KERJA PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Fasilitasi penilaian indeks pelayanan publik oleh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pengelolaan forum konsultasi pelayanan publik, pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di unit utama dan unit pelaksana teknis Kemenkes.

7. TIM KERJA KOMUNIKASI INTERNAL DAN KEHUMASAN

LINGKUP TUGAS

Program pengembangan karir untuk jabatan fungsional pranata humas dan pengelola kehumasan, peningkatan kapasitas untuk jabatan fungsional pranata humas dan pengelola kehumasan, koordinasi dengan Bakohumas dan Humas K/L lain, pengelolaan *cybertroops* di lingkungan Kemenkes, pelaksanaan award kehumasan, pengelolaan komunikasi internal terkait transformasi internal, pengelolaan konten terkait Biro Komunikasi dan Informasi Publik di *website* Sekretariat Jenderal

8. TIM KERJA PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

LINGKUP TUGAS

Pengembangan NSPK kepastakawanan, pengembangan karir untuk jabatan fungsional pustakawan, pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, peningkatan kapasitas untuk jabatan fungsional pustakawan, pembinaan dana akreditasi perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, koordinasi dengan Perpustakaan Nasional dan K/L lainnya terkait kepastakawanan, pengorganisasian bahan pustaka perpustakaan Kementerian Kesehatan, pengelolaan repository Kementerian Kesehatan

9. TIM KERJA DUKUNGAN MANAJEMEN

LINGKUP TUGAS

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Biro, pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Biro, pengelolaan layanan sumber daya manusia dan organisasi tata laksana, koordinasi pengelolaan kearsipan, koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, monitoring dan evaluasi kegiatan Biro, penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan

Untuk mewujudkan RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan di tahun 2024 dan memperhatikan pencapaian Prioritas Nasional Bidang Kesehatan serta Rencana Aksi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, maka akan dilaksanakan strategi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik tahun 2025 ada dua yaitu, Kegiatan Pokok dan Indikatif.

**Gambaran Kegiatan Pokok dan Indikatif
Biro Komunikasi dan Informasi Publik**



Kegiatan Indikatif tersebut dapat dijabarkan berikut ini:

1. Pengelolaan Manajemen Isu

Kegiatan indikatif ini fokus untuk memonitor berbagai isu/opini kesehatan yang beredar di berbagai media pemberitaan, beberapa bentuk kegiatan yang dirancang seperti rapat, pertemuan evaluasi, konsinyasi, survei dan lain-lain.

2. Penataan Pedoman/Petunjuk Teknis

Kegiatan indikatif ini mencakup penyiapan buku pedoman dalam pengelolaan Komunikasi Publikasi dan Pelayanan Publik, seperti Strategi Komunikasi, Komunikasi Risiko, Komunikasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pelayanan Publik dan lain lain. Kegiatan dapat dirancang seperti rapat, *workshop*, diseminasi, kerjasama dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

3. Publikasi Kebijakan/Program

Kegiatan indikatif ini mencakup semua bentuk publikasi atau penyebarluasan informasi kebijakan/program Kesehatan kepada publik melalui media cetak, elektronik dan digital. Berbagai bentuk kegiatan dapat dirancang seperti *advertorial*, *talkshow*, *gathering* media, penulisan di Mediakom, temu media, *Podcast*, *reportase* berita kesehatan, ekspose pembangunan kesehatan di daerah bersama media, peliputan dan dokumentasi kegiatan kesehatan dan lain- lain.

4. Koordinasi dan Sinergi antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Kegiatan indikatif mencakup komunikasi secara internal dan eksternal dengan Kementerian/Lembaga, termasuk dengan lembaga non pemerintah. Berbagai kegiatan dapat dirancang seperti rapat, pendampingan pimpinan dalam Raker/RDP dengan

DPR/DPD, temu Bakohumas, pendampingan pimpinan dalam kunjungan kerja bersama dewan, pendampingan pimpinan pada daerah binaan, dan lain-lain.

5. Pengelolaan Pelayanan Informasi

Kegiatan indikatif mencakup semua bentuk layanan informasi yang diberikan sesuai permintaan publik. Berbagai kegiatan dapat dirancang seperti informasi pada *signage*, layanan melalui *contact center* 1500567, PPID, LAPOR, Pojok Info, dan ULT.

6. Pengelolaan Perpustakaan

Kegiatan indikatif ini mencakup pengelolaan perpustakaan yang terbaik untuk semua *customer* yang membutuhkan informasi akan literatur kesehatan baik secara manual atau berbasis teknologi informasi. Beberapa kegiatan dapat dirancang seperti rapat, temu nasional perpustakaan, pengembangan sistem layanan perpustakaan (*hardware* dan *software*), dan lain-lain.

7. Penguatan SDM Pelaku Komunikasi Publik

Kegiatan indikatif ini mencakup untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan dari para pelaku yang bergerak dalam komunikasi-publik. Beberapa kegiatan dapat dirancang seperti rapat, koordinasi, peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui pelatihan, kursus, pembinaan, rapat atau pertemuan.

8. Penguatan SDM Pelaku Pelayanan Publik

Kegiatan indikatif ini mencakup untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan dari para pelaku yang bergerak dalam pengelolaan perpustakaan dari pusat sampai dengan UPT dan pelayanan publik kesehatan lainnya. Beberapa kegiatan dapat dirancang seperti rapat, pembinaan atau pendampingan, pelatihan kursus dan lain-lain.

9. Pengelolaan Administrasi Biro

Kegiatan indikatif ini mencakup dukungan layanan internal organisasi/satuan kerja. Beberapa kegiatan dapat dirancang seperti pembinaan perencanaan dan monev program dan anggaran, pembinaan akuntansi keuangan dan BMN, pembinaan kapasitas SDM.

10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan indikatif ini mencakup pemenuhan akan sarana dan prasarana kerja pada satuan kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik seperti pengadaan kamera, komputer, printer dan renovasi prasarana. Dengan lima strategi dalam upaya mencapai RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan dan program di lingkup Sekretariat Jenderal serta Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Peta Strategi Biro Komunikasi dan Informasi Publik



D) SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun Semester I TA 2025 disusun untuk menggambarkan pencapaian kinerja biro selama tahun berjalan. Laporan ini tidak hanya mencatat hasil kinerja selama semester I tahun 2025, tetapi juga membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memberikan perspektif mengenai tren dan perkembangan organisasi. Perbandingan ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja unit kerja secara keseluruhan. Melalui analisis capaian kinerja, laporan ini juga mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Dengan pendekatan analitis tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik disusun sebagai berikut:

1. Bab I (Pendahuluan): menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, serta sistematika penyajian laporan.
2. Bab II (Perencanaan dan perjanjian kinerja): menjelaskan Perencanaan Kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, DO Indikator Kinerja Kegiatan) dan Perjanjian Kinerja 2025 Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja): menjelaskan tentang capaian kinerja 3 tahun terakhir, Analisis Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025, sumber daya manusia, anggaran serta Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka

pencapaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik selama semester I Tahun 2025.

4. Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut): berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2024 dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A) Perencanaan Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang sebagai landasan strategis untuk mewujudkan *good governance* dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Sistem ini tidak hanya menjadi alat pemantauan kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai pendekatan manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Dalam konteks ini, SAKIP memberikan kerangka kerja yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian sasaran organisasi yang dikalkulasi berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan relevan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, sebagai entitas yang bertanggungjawab menjalankan fungsi strategis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah menetapkan proses bisnis dan indikator yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Pentingnya perencanaan kinerja di Biro Komunikasi dan Informasi Publik terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dijalankan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Dengan perencanaan yang terstruktur, biro dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengidentifikasi prioritas dan mengantisipasi tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, sehingga dalam hal ini akan mempermudah proses monitoring dan evaluasi demi perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun proses bisnis unit kerja difokuskan pada; a) pengelolaan manajemen isu, Strategi Komunikasi dan Komunikasi Risiko; b) pengelolaan publikasi kesehatan; c) koordinasi komunikasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga; dan d) pengelolaan pelayanan publik dan dukungan administrasi Biro.

Gambaran Proses Bisnis Biro Komunikasi dan Informasi Publik



1. Visi dan Misi

Pada Kabinet Merah Putih, visi dan misi Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat yang Sehat Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas”, adapun upaya mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan melalui 4 (empat) misi Kementerian Kesehatan yaitu:

- a. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
- b. Membudayakan gaya hidup sehat
- c. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
- d. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif
- e. Menguatkan tata kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
- f. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
- g. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Visi dan Misi tersebut merupakan visi misi bersama semua unit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi untuk tercapainya visi. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan telah ditetapkan tujuan strategis yaitu:

- 1) Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
- 2) Masyarakat berperilaku hidup sehat
- 3) Layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
- 4) Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
- 5) Tata kelola dan pendanaan kesehatan yang efektif
- 6) Teknologi kesehatan yang maju
- 7) Kementerian kesehatan yang *agile*, efektif dan efisien

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta tujuan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik perlu mempublikasikan, mengkomunikasikan kebijakan/program pada semua *stakeholder* dan masyarakat luas secara masif termasuk hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai. Semua hal ini dituangkan dalam rencana kinerja Biro Komunikasi dan

Informasi Publik, untuk itu telah ditetapkan tujuan strategis dalam perencanaan kinerja pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik:

- 1) Penguatan pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko.
- 2) Penguatan pengelolaan publikasi (media konvensional dan digital).
- 3) Peningkatan layanan informasi, pengaduan masyarakat, peliputan dan pendokumentasian hasil-hasil pembangunan kesehatan.
- 4) Penguatan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial secara profesional.
- 5) Penguatan koordinasi hubungan komunikasi dan jejaring antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
- 6) Peningkatan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pustakawan.
- 7) Pengelolaan tata kelola administrasi umum Biro dengan baik, bersih dan transparan.

2.2 Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan promotif dan preventif
- 2) Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
- 3) Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat
- 4) Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan laboratorium kesehatan
- 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan
- 6) Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan
- 7) Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah
- 8) Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan
- 9) Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan
- 10) Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis
- 11) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Sebagai unit yang diberikan tugas pengelolaan publikasi dan pelayanan publik kementerian, maka sasaran kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah meningkatnya pengelolaan publikasi komunikasi dan pelayanan publik yaitu dengan:

“Meningkatkan akses dan kualitas publikasi-komunikasi dan pelayanan publik menuju layanan prima dengan penekanan penguatan strategi komunikasi, penyediaan produk komunikasi berkualitas, SDM Pranata Humas dan Pustakawan yang kompeten, penguatan koordinasi antar Lembaga dan pengembangan jejaring dengan didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dapat tercapai untuk kurun lima tahun kedepan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yaitu:

8 (delapan) sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik



3. STRATEGI

Untuk mewujudkan agenda pembangunan dalam RPJMN, maka Biro Komunikasi dan Informasi Publik menunagkan strategi dalam Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai berikut:

Strategi Publikasi Komunikasi dan Pelayanan Publik



4. INDIKATOR KINERJA

Merujuk Revisi Renstra Kementerian Kesehatan 2022-2024, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan ditetapkan bahwa Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Untuk mencapai salah satu sasaran Program Dukungan Manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal, satuan kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang diberi amanah dalam menjaga citra dan reputasi Kementerian Kesehatan diberi tanggungjawab dalam kegiatan pengelolaan publikasi dan pelayanan publik. Sehubungan belum disahkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, maka indikator pencapaian sasaran yang berlaku berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan terdahulu adalah: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi dengan realisasi pada semester I senilai 0, dan (2) Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan sebanyak 0. Realisasi saat ini dipengaruhi oleh belum disahkannya Rencana Strategis (Renstra) yang masih dalam proses, sehingga Indikator Kinerja Kegiatan belum dapat dijalankan secara optimal. Meskipun demikian, untuk memastikan manajemen waktu pelaksanaan tetap efektif dan target tercapai pada akhir tahun, Biro Komunikasi dan Informasi Publik terus melakukan langkah antisipatif dengan tetap menyusun dan menjalankan perencanaan kegiatan secara paralel sambil menunggu pengesahan Renstra tersebut. Secara rinci target Indikator Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai berikut:

**Matrik Kinerja Kegiatan
Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2022-2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	2022		2023		2024		2025	
			T	R	T	R	T	R	T	R Semester 1
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita	82	B06: 85,34 B12: 86,28	83	B06: 88,20 B12: 89,36	83	B06: 89,36 B12: 90,17	83	0

		dan Publikasi								
		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	30	25	37	46	40	44	40	0

Adapun berikut adalah matriks Indikator Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang tercantum dalam *draft* Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI
		2025	2026	2027	2028	2029	SEMESTER I 2025
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	77	78	80	82	85	0
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	78	80	82	85	0

Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	70	105	140	166	0
--	----	----	-----	-----	-----	---

5. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA

Untuk memudahkan perhitungan Indikator Kinerja berdasarkan Rencana Strategis 2022-2024 maka disusun definisi operasional ke dua IKK sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi (berita/publikasi) kesehatan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Cara Perhitungan: Pengukuran melalui survei dengan nilai IKM kategori Baik sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan

Definisi Operasional: Kategori Baik adalah jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian diatas 70.

Cara Perhitungan: Melakukan penilaian melalui survei dengan angka *range* standar penilaian sebagai berikut : 91-100 Prima; 81-90 sangat baik; 71-80 Baik; 61-70 Cukup; 51-60 Kurang; dan 0-50 Buruk.

Adapun terkait dengan Indikator Kinerja baru mengenai Indeks Kepuasan Pelanggan adalah sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Pelanggan Kementerian Kesehatan

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) dari seluruh unit utama Kementerian

Kesehatan yang diperoleh melalui berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utu,a dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenpanRB tersebut.

Cara Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh unit utama Kementerian Kesehatan berdasarkan 9 unsur layanan dengan range standar penilaian sesuai peraturan sebagai berikut: 88,31-100 Sangat Baik; 76,61-88,30 Baik; 65,00-76,60 Kurang Baik; dan 25,00-64,49 Tidak Baik

b. Indeks Kepuasan Pelanggan Sekretariat Jenderal

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) dari lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utu,a dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenpanRB tersebut.

Cara Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan 9 unsur layanan dengan range standar penilaian sesuai peraturan sebagai berikut: 88,31-100 Sangat Baik; 76,61-88,30 Baik; 65,00-76,60 Kurang Baik; dan 25,00-64,49 Tidak Baik

C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Penetapan kinerja berisi komitmen yang dituangkan dalam rencana kinerja tahunan antara pimpinan unit kerja sebagai penerima tanggung jawab dengan pihak yang mendelegasikan amanah tersebut. Dalam konteks ini, Perjanjian Kinerja menjadi instrumen untuk mengukur akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja demi tercapainya tujuan instansi.

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis 2020-2024. Target capaian indikator kinerja kegiatan untuk tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan komunikasi publik dari program kegiatan pengelolaan komunikasi publik adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		TARGET
1.	Indeks ctahuapaian Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang Baik	86
SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	90,01
2.	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal	96%
SASARAN KEGIATAN: PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83
2.	Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40
3.	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal	80,1
4.	Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%
5.	Kualitas Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR	Baik
6.	Survei Kepuasan Masyarakat	87,50

1) Sasaran Strategis

Sasaran strategis Biro Komunikasi dan Informasi merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu “Indeks Capaian Tata Kelola Kementerian Kesehatan yang Baik,” dengan target nilai sebesar 86. Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks Kementerian Kesehatan, fungsi dari sasaran ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses komunikasi, baik internal maupun eksternal, mendukung terciptanya birokrasi yang informatif, responsif, serta memperkuat keterbukaan informasi publik. Melalui sasaran ini, Biro Komunikasi dan Informasi memiliki peran penting dalam memperbaiki persepsi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Sasaran Program Dukungan Manajemen

a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Meskipun tidak mengampu indikator kinerja program secara langsung, seluruh unit kerja termasuk Biro Komunikasi dan Informasi Publik diwajibkan berkontribusi terhadap pencapaian indikator mandatory "Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan". Indikator ini menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 90,01.

b. Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal

"Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal" merupakan indikator mandatory yang diberikan kepada seluruh unit kerja, termasuk Biro Komunikasi dan Informasi Publik, dengan mempertimbangkan prinsip cascading dari unit utama ke unit kerja pelaksana dalam hal pengelolaan anggaran. Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal secara menyeluruh. Target tahunan untuk indikator ini ditetapkan sebesar 96%, sehingga menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar mendukung pencapaian kinerja organisasi secara kolektif.

3) Sasaran Kegiatan

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi sebelumnya merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diampu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam Renstra 2020–2024. Namun, dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, indikator ini tidak lagi dimuat sebagai IKK, melainkan dialihkan menjadi bagian dari kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Meskipun demikian, pengukuran indeks ini tetap penting sebagai dasar evaluasi kualitas layanan komunikasi publik. Target nilai indeks tahun 2024 sebesar 83 ditetapkan sebagai baseline untuk pengukuran pada periode

selanjutnya. Saat ini, kegiatan pengumpulan data untuk pengukuran indeks belum dapat direalisasikan akibat kendala anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan masih tertunda.

b. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan

Jumlah UPT Kementerian Kesehatan dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi dan Informasi Publik, baik dalam Rencana Strategis 2020–2024 maupun pada periode 2025–2029. Indikator ini mencerminkan komitmen biro dalam mendorong peningkatan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan. Saat ini, pelaksanaan kegiatan pengukuran terhadap indikator tersebut telah dimulai dan tengah memasuki tahapan survei lapangan di sejumlah UPT. Hasil akhir diharapkan dapat diperoleh dan dilaporkan pada bulan Oktober, sejalan dengan target capaian yang telah ditetapkan.

c. Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal

Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian kualitas nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal secara keseluruhan. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efisien, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran, biro berperan dalam mendukung tercapainya tata kelola keuangan yang efektif. Adapun target nilai kinerja penganggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,1, yang menuntut komitmen seluruh unit kerja, termasuk Biro Komunikasi dan Informasi Publik, untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara berkelanjutan.

d. Realisasi Anggaran Unit Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Realisasi Anggaran Unit Kerja” merupakan bentuk cascading dari Indikator Kinerja Program (IKP) “Realisasi Anggaran Program” yang diturunkan berdasarkan struktur pengelolaan anggaran, bukan kinerja anggarannya, melainkan fokus pada aspek persentase

penyerapannya. Hal ini mencerminkan keterkaitan antara tingkat serapan anggaran di tingkat program dengan pelaksanaannya di unit kerja, sehingga pencapaian target realisasi anggaran di masing-masing unit menjadi kontribusi langsung terhadap pencapaian realisasi anggaran program secara keseluruhan. Dengan demikian, efektivitas penyerapan anggaran oleh unit kerja menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program yang direncanakan.

e. Kualitas Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR

Indikator “Kualitas Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR” merupakan ukuran kinerja pelayanan publik dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat secara efektif, dengan target capaian kategori “Baik”. SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sistem nasional yang dikelola oleh Kementerian PANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI, yang menjadi kanal tunggal resmi untuk pengaduan pelayanan publik. Sistem ini bertujuan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat diterima, diproses, dan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dasar hukum pelaksanaan SP4N-LAPOR antara lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map SP4N-LAPOR Tahun 2020–2024. Melalui indikator ini, kualitas respons dan penyelesaian pengaduan menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik.

e. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan terhadap pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama Biro Komunikasi dan Informasi Publik, yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Permenpan ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan instansi pemerintah. Dalam konteks

implementasinya di Kementerian Kesehatan, Permenpan tersebut menjadi dasar bagi unit-unit pelayanan, termasuk rumah sakit, balai, dan UPT lainnya, untuk secara periodik menyelenggarakan survei yang objektif dan terstandar. Hasil survei digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan layanan, merumuskan perbaikan berkelanjutan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian esensial dari manajemen yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja melalui perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan dengan menganalisis kesesuaian target dan realisasi dari setiap indikator kinerja kegiatan yang telah dirumuskan. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme evaluasi yang memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang ditentukan.

Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka akan ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan dan perencanaan kedepan sehingga setiap program/kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Biro Komunikasi dan Informasi Publik melakukan pengukuran kinerja secara periodik dan dibahas diantara Pejabat Struktural, Ketua Tim Kerja dan staf, serta dalam rapat koordinasi staf rutin.

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yaitu:

MENINGKATNYA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2022 - 2024, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi ; dan
2. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan.

Pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu Renstra, namun demikian perubahan setiap tahun akan terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	T	R
			2025	2025
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	0
		2. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40	0

***Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan TA 2024**

Dilihat dari capaian masing-masing indikator, untuk Tahun 2025 Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat melaksanakan dan mencapai sasaran kinerja dengan baik. Adapun uraian capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik yaitu sebagai berikut:

1. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PERTAMA:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	0

Definisi Operasional Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi (berita/publikasi) kesehatan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tujuan Pelaksanaan Indikator

- a. Mengukur tingkat kepuasan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi kebijakan kesehatan yang telah dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada semester I dan II tahun berjalan;
- b. Mengetahui perubahan (peningkatan/penurunan) kepuasan masyarakat dari periode sebelumnya;
- c. Menginventarisasi area layanan publikasi yang perlu diperbaiki;
- d. Mengetahui kebutuhan dan keinginan (*need and want*) masyarakat terhadap informasi kesehatan; dan
- e. Mengetahui kebiasaan masyarakat dalam merespon isu kesehatan dan berita/informasi yang berpotensi *hoax*.

Cara Perhitungan Indikator

Dalam mengukur IKM, indikator dan parameter merujuk PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 indikator/unsur yang terdiri dari:

- a. Persyaratan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Guna mencapai tujuan indikator, maka parameter dari 9 unsur tersebut dapat dikembangkan agar mencerminkan aspek layanan terkait pemberitaan dan publikasi secara lebih spesifik dan relevan. Dengan demikian, hasil survei menjadi lebih akurat dalam menilai efektivitas pengelolaan berita dan publikasi di berbagai *platform* yang digunakan.

Metode pengumpulan data dilakukan secara *mixed method*, yaitu menggabungkan antara riset kuantitatif dan riset kualitatif. Riset kuantitatif dilakukan dengan cara

pengumpulan data melalui *online survey* dan *telephone survey* terhadap sejumlah responden yang ditargetkan. Sedangkan, riset kualitatif dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam yang melibatkan informan dari beberapa orang yang telah mengikuti survei *online/telepon*.

Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dengan formulasi yang sudah ditetapkan dalam PermenPANRB. Kemudian, dianalisis menggunakan konsep analisis diagram Pencar: IPA Analysis. *Importance Performance Analysis* (IPA) digunakan untuk mengetahui area dari parameter yang menjadi prioritas untuk dipertahankan atau yang harus diperbaiki.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi, pada tahun 2025 mempunyai target 83. Pelaksanaan survei semester I akan dilakukan bulan Juli-Agustus dan semester II diselenggarakan pada bulan November-Desember.

Hasil/Keluaran

- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Evaluasi dan rekomendasi terkait perbaikan layanan

Analisis Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Indikator :

a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target

Untuk mencapai target IKK yang ditetapkan, telah dilakukan kegiatan publikasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media (PESO media) sebagai berikut:

- 1) Publikasi Berita di *website* Kemenkes dan sehatnegeriku.
- 2) Publikasi Konten di Akun Media Sosial Kemenkes (Facebook, X.com, Instagram, YouTube, TikTok).
- 3) Wawancara media dengan juru bicara atau pejabat Kemenkes
- 4) Media *Briefing* dan Jumpa Pers
- 5) Reportase berita
- 6) Peliputan dan Dokumentasi
- 7) Siaran Radio Kesehatan
- 8) *Podcast* Kemencast
- 9) Penerbitan Majalah Mediakom
- 10) Pelibatan *Influencer* atau Pemengaruh di Media Sosial
- 11) Publikasi Advetorial di Media Cetak dan Media Sosial
- 12) *Talkshow* di TV dan Radio

b. Permasalahan

Dalam pelaksanaan survei IKM, terdapat beberapa tantangan/permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan hasil survei berikutnya yakni masih ada rekomendasi yang diberikan pada survei IKM tahun 2024 belum sepenuhnya dilakukan di lingkup Biro Komunikasi dan Informasi Publik, sehingga perlu dukungan Humas Unit Utama untuk berkontribusi secara aktif dalam melakukan taktik komunikasi yang terintegrasi.

c. Pemecahan masalah

Untuk mengatasi permasalahan bahwa rekomendasi dari survei IKM tahun 2024 belum sepenuhnya dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap progres implementasi rekomendasi tersebut di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi hambatan spesifik, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, atau belum adanya prioritas implementasi. Setelah itu, biro perlu menyusun rencana aksi yang lebih realistis dan terukur, menetapkan penanggung jawab setiap rekomendasi, serta mengaktifkan forum komunikasi lintas unit agar tercipta sinergi. Selain itu, penting untuk memperkuat peran monitoring dan supervisi atas pelaksanaan rekomendasi secara berkala.

d. Rencana Tindak Lanjut

Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama, pelatihan peningkatan kapasitas SDM humas, serta pembentukan tim kerja lintas unit yang fokus pada implementasi hasil survei IKM. Selain itu, akan dijadwalkan pertemuan rutin antar-humas untuk berbagi praktik baik dan memantau kemajuan secara kolektif.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) KEDUA:

Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik Dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40 UPT	0

Definisi Operasional :

Kategori Baik yaitu jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian diatas 71.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan tahun 2024 mempunyai target 40 UPT dengan realiasi sebanyak 4 UPT dengan nilai Baik, Sangat Baik dan Prima. Indikator Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah jumlah UPT dengan minimal dengan kategori Baik ketika dilakukan monev berupa survei kepatuhan interaksi perilaku pelayanan publik. Untuk mengukur tingkat kepatuhan tersebut telah dilakukan beberapa pemilahan kriteria calon Unit Lokus Evaluasi (ULE). Adapun skema tahapannya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Sebanyak 164 UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan telah terpapar dengan prinsip *service excellence*. Adapun rincian dari 164 UPT tersebut terdiri dari Rumah Sakit Vertikal, Kekarantinaan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Besar Biomedis Kesehatan Jakarta, Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes. Sehingga UPT mampu menyusun rencana aksi peningkatan standar perilaku interaksi layanan sehingga mendapat monitoring standar perilaku interaksi layanan. Selanjutnya, Biro Komunikais dan Informasi Publik menjalankan pengawasan standar perilaku interaksi layanan sehingga pelaksanaan standar perilaku interaksi layanan yang dilakukan pada satuan kerja tersebut dapat dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun penjelasan pelaksanaan standar perilaku interaksi layanan yang telah dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tujuan pelaksanaan kegiatan

- 1) Mengetahui tingkat kepatuhan pelaksanaan Pedoman Interaksi Pelayanan Publik pada UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 2) Mengetahui praktek interaksi layanan atas pelaksanaan Pedoman Interaksi Pelayanan Publik pada UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 3) Mengetahui kelemahan dan kekurangan pelaksanaan Pedoman Interaksi Pelayanan Publik pada UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai acuan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk merumuskan kebijakan perbaikan di masa depan.
- 5) Mendorong persaingan yang positif antar UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan interaksi pelayanan publik
- 6) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja unit pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan

Metode

- 1) Survei kepatuhan layanan interaksi ini menggunakan metode *mystery guest* atau *mystery shopping*
- 2) *Mystery guest* adalah salah satu teknik survei dalam menilai kualitas pelayanan publik dengan cara menugaskan seseorang atau sekelompok orang untuk berkunjung ke unit pelayanan dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami, mengamati, dan menilai kesesuaian layanan dengan standar pelayanan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no 31 Tahun 2014)
- 3) Kriteria penilaian adalah:

Nilai	Kriteria
91%-100%	Prima
81%-90%	Sangat Baik
71%-80%	Baik
61%-70%	Cukup
51%-60%	Kurang
0%-50%	Buruk

Objek Survey Penilaian Standar Perilaku Interaksi Layanan Tahun 2025

Terdapat 58 UPT yang menjadi lokus target penilaian pada tahun 2025, hingga bulan Juni 2025, progres telah memasuki tahap proses survei lapangan untuk pengumpulan data ke beberapa UPT. Adapun daftar lokus/lokasi survei kepatuhan sebagai berikut:

Rumah Sakit:

1. RS Stroke Dr. Mohammad Hatta Bukit Tinggi
2. RSUP Dr. Mohammad Hosein Palembang
3. RSAB Harapan Kita Jakarta
4. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
5. RSUP Hasan Sadikin Bandung
6. RSKO Cibubur
7. RSUP Persahabatan Jakarta
8. RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta
9. RSUP H. Adam Malik Medan
10. RSUP Ratatotok Buyat
11. RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
12. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
13. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
14. RS Mata Makassar

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta

Balai Laboratorium Kesehatan

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala Sulawesi Tengah

Balai Kekarantinaan Kesehatan

1. BKK Kelas II Pangkal Pinang
2. BKK Kelas I Tanjung Pinang
3. BKK Kelas II Lhoksumawe Aceh
4. BKK Kelas I Bandung
5. BKK Kelas I Mataram
6. BKK Kelas II Jambi
7. BKK Kelas II Bitung
8. BKK Kelas I Banjarmasin

9. BKK Kelas I Padang
10. BKK Kelas I Banda Aceh
11. BKK Kelas II Bengkulu
12. BKK Kelas I Semarang
13. BKK Kelas II Biak
14. BKK Kelas I Kupang
15. BKK Kelas II Poso
16. BKK Kelas II Palangkaraya

Balai Pelatihan Kesehatan

1. Bapelkes Mataram
2. Bapelkes Cikarang
3. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
4. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto

Politeknik Kesehatan Kemenkes

1. Poltekkes Kemenkes Jakarta III
2. Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang
3. Poltekkes Kemenkes Surakarta
4. Poltekkes Kemenkes Bengkulu
5. Poltekkes Kemenkes Jakarta I
6. Poltekkes Kemenkes Bandung
7. Poltekkes Kemenkes Semarang
8. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
9. Poltekkes Kemenkes Denpasar
10. Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang
11. Poltekkes Kemenkes Medan
12. Poltekkes Kemenkes Banda Aceh
13. Poltekkes Kemenkes Jambi
14. Poltekkes Kemenkes Palu
15. Poltekkes Kemenkes Jayapura
16. Poltekkes Kemenkes Malang
17. Poltekkes Kemenkes Manado
18. Poltekkes Kemenkes Mataram
19. Poltekkes Kemenkes Kupang

20. Poltekkes Kemenkes Ternate
21. Poltekkes Kemenkes Sorong
22. Poltekkes Kemenkes Ambon

Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepatuhan Interaksi

Diawali penentuan lokus penilaian dan pembuatan *timeline* kegiatan. Dilanjutkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penguatan secara daring oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Selanjutnya dilakukan pengambilan data survei lapangan, pengolahan data, analisis dan rekomendasi perbaikan sesuai butir instrumen penilaian.



Pelaksanaan Survei Interaksi Layanan

Rekrutmen surveyor untuk pelaksanaan kepatuhan interaksi pelayanan publik menggunakan jasa pihak ketiga. Surveyor yang akan berperan sebagai tamu misteri (*mystery guest*) mendapatkan pelatihan oleh konsultan. Pengetahuan terkait instrumen dan objek UPT menjadi bekal ketika turun ke lapangan. Pada saat turun ke lapangan, surveyor didampingi staf Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan penilaian kepatuhan interaksi layanan, surveyor melakukan penyamaran menjadi masyarakat umum yang membutuhkan informasi atau menjadi pasien atau yang mengamati langsung proses pelayanan publik secara rahasia.

Setiap titik UPT pengamatan dilakukan oleh minimal 1 orang petugas dari pihak ketiga dan 1 pendamping. Khusus rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada banyak konsumen, maka petugas melakukan 2 kali pengamatan rahasia yakni pelayanan di waktu pagi dan siang. Sedangkan untuk jenis pelayanan lainnya akan menyesuaikan, karena jumlah konsumen yang mendapat layanan lebih sedikit. Sebagian besar pelayanannya dilakukan secara *online*.

Sosialisasi Program ke SDM Institusi Layanan UPT

Program penilaian kepatuhan interaksi pelayanan publik yang sudah dibakukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 33 tahun 2019 ini sudah disosialisasikan melalui Surat Edaran Sekretaris Kementerian Kesehatan. Dalam edaran tersebut menjelaskan mekanisme penilaian dan rentang waktu penilaian yang sudah ditetapkan.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada unit pelaksana teknis (UPT) melalui pertemuan baik secara *offline* maupun *online*. Dalam sosialisasi ini juga diberikan alat penilaian/*tools*/borang yang dapat UPT pelajari dan melakukan penilaian secara mandiri.

Survei Lapangan

Selanjutnya, UPT tersebut akan mendapat kunjungan monitoring evaluasi secara rahasia oleh SDM yang terdiri dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Satuan kerja pembina di atasnya. Apabila terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi di rumah sakit, maka satker yang terlibat adalah Sekretariat Direktorat Pelayanan Kesehatan.

Kemudian hasil monitoring dipaparkan dihadapan manajemen dan pimpinan UPT pada hari terakhir kunjungan. Petugas juga memberikan beberapa catatan dan rekomendasi perbaikan pelayanan selanjutnya. Rekomendasi disertai dengan hasil temuan beberapa interaksi layanan yang untuk mendapat perhatian untuk perbaikan.

Alat Penunjang Penilaian

Dalam melakukan penilaian, surveyor harus membawa alat penunjang yang dapat memperlancar pelaksanaan penilaian. Alat tersebut berupa alat perekam suara, perekam gambar, surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Alat kelengkapan penunjang penilaian ini harus disiapkan oleh setiap petugas yang sudah mendapat surat tugas penilaian sebelum turun ke lapangan melaksanakan penilaian kepatuhan. Petugas juga harus mempersiapkan perencanaan pergi dan pulang, berupa tiket perjalanan dan penginapan yang sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target:

- 1) Pembinaan, pendampingan pelayanan publik secara *online* dan *offline*
- 2) Dukungan pimpinan dan jajaran UPT dalam mendukung kegiatan Interaksi Kepatuhan Layanan Publik.

- 3) Pembinaan kepada unit layanan publik yang akan menjadi sampel penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

b. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya komitmen dari beberapa pimpinan UPT, maupun belum optimalnya pembinaan dari unit eselon I yang bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam peningkatan kualitas standar pelayanan publik
- 2) Adanya perubahan/rotasi pimpinan, maupun perubahan SOTK di Kementerian Kesehatan sehingga perlu pengulangan workshop pimpinan.

c. Pemecahan Masalah

- 1) Perlu penguatan pembinaan dari unit eselon I bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik, dengan disesuaikan anggaran untuk mencapai target tahunan.
- 2) Dilakukan pemetaan awal dan *self-assessment* untuk UPT yang akan disurvei.
- 3) Penilaian terhadap UPT dengan menambahkan 10% dari total target yang akan dicapai.
- 4) Meningkatkan pembinaan dan penguatan kepatuhan standar pelayanan publik kepada unit layanan publik yang menjadi sampel penilaian Praktek Baik Pelayanan Publik.

d. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Melakukan optimalisasi pembinaan terhadap UPT dengan membuat program bersama dengan unit eselon I terkait.
- 2) Melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan unit eselon I sehingga UPT terkait dapat melakukan *self-assessment* terlebih dahulu dengan indikator yang ada.
- 3) Mengupayakan pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik setelah lokus mempersiapkan diri dengan perbaikan layanan publiknya.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik kepada unit layanan publik yang akan menjadi sampel penilaian Praktek Baik Pelayanan melalui Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri institusional.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN PENDUKUNG INDIKATOR PENDUKUNG KEGIATAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik tidak hanya berfokus pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan yang tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut dapat memiliki hubungan

langsung dengan capaian IKK atau bersifat tidak langsung, namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Indikator pendukung yang dimaksud mencerminkan elemen-elemen tambahan yang berperan dalam memperkuat capaian. Indikator pendukung yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

STRATEGI KOMUNIKASI

1. Media Monitoring di Media Massa dan Media Digital dan Analisis Pemberitaan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes mempunyai berbagai tugas, yang salah satunya melakukan pengelolaan opini publik dan manajemen isu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka perlu dilakukan pemantauan isu media atau media monitoring, baik pada media massa maupun media sosial.

Guna melaksanakan salah satu tugasnya dalam mengelola isu, Biro Komunikasi dan Informasi Publik membutuhkan bantuan alat/*tools* media monitoring yang dapat mengamati dan mengolah *big data*. Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes menyadari bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak terhindarkan, di mana perkembangan ini dapat mempengaruhi informasi dan isu yang diterima dan berkembang di masyarakat. Dengan berlangganan *tools* yang dapat mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isi dari sebuah artikel, berita atau naskah berita, iklan media massa, hingga percakapan di media sosial. Isinya dapat berkaitan dengan suatu peristiwa, menyangkut siapa, mengapa bisa terjadi, sumber daya publik yang berkaitan, kebijakan, dan dampak apa yang dapat terjadi atau harus diantisipasi, serta hal lainnya. Dengan menggunakan *tools* media monitoring diharapkan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- a) Menggunakan media monitoring online *tools* untuk media massa. Biro Komunikasi dan Informasi Publik berperan selaku admin utama, perangkat ini juga dapat digunakan oleh para pejabat fungsional Hubungan Masyarakat di unit utama lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai user untuk mengolah data media monitoring sesuai kebutuhannya masing-masing.
- b) Menggunakan media monitoring *online tools* untuk media sosial bekerja sama dengan Tools ini juga dapat diakses oleh pengguna di luar Biro Komunikasi dan Informasi Publik guna membantu unit utama/satuan kerja terkait dalam memantau perkembangan percakapan warganet di media sosial.
- c) Berbagai berita dan isu yang termonitor diolah, dianalisis, dan dilaporkan secara berkala (harian pagi dan sore, mingguan, bulanan dan tahunan).

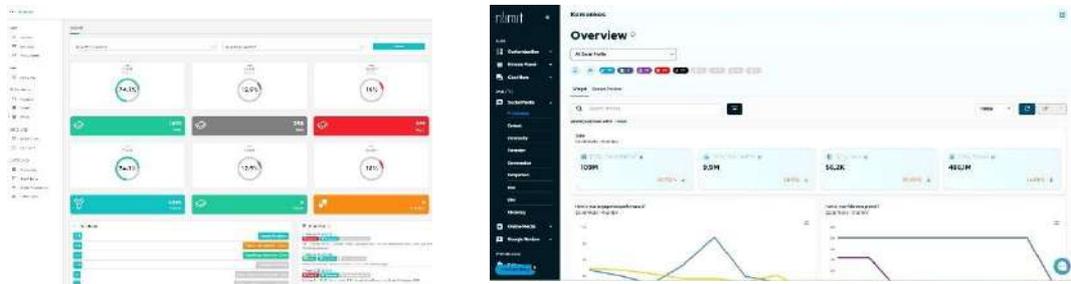
- d) Monitoring dan sistem peringatan dini juga dilakukan, jika terdapat isu-isu negatif. Disampaikan melalui WhatsApp dan email.
- e) Untuk isu-isu khusus tertentu, penyedia jasa *tools* media monitoring bersama tim Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyiapkan laporan media monitoring khusus.
- f) Kegiatan ini bersifat rutin di tahun berjalan

Dengan mengimplementasikan proses tersebut, kegiatan media monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif. Adapun hasil/keluaran kegiatan tersebut adalah:

- a) Laporan Media Monitoring Media Massa (Cetak, Online, TV, dan Radio) selama bulan Januari – Desember tahun 2024:
 - 146 laporan harian
 - 23 laporan media monitoring mingguan
 - 5 laporan media monitoring bulanan
- b) Laporan Monitoring Media Sosial (X.com, Facebook Fanpage, Instagram (*hashtag*), YouTube, dan Media *Online*) selama bulan Januari - Desember 2024:
 - 146 Laporan harian monitoring media *online* dan media sosial
 - 23 Laporan media monitoring mingguan
 - 5 Laporan media monitoring media *online* dan media sosial bulanan
- c) Laporan Media Monitoring Isu Khusus sebanyak 12 laporan media monitoring isu khusus kesehatan lainnya (Januari-Juni 2025). Laporan Media media monitoring khusus untuk memantau isu tertentu yang berpotensi memberikan sentimen negatif.
- d) Agenda Setting *biweekly* dengan hari kesehatan atau isu yang sedang berkembang untuk membahas rencana komunikasi per dua minggu.
- e) Isu-isu yang dipantau pada periode semester I TA 2025 yakni:
 - 10 -11 April 2025 Media monitoring Khusus Isu Kasus Kekerasan Seksual Dokter PPDS
 - 15 – 16 April 2025 Pemberitaan Klarifikasi Kemenkes Terkait Isu Tukang Gigi
 - 17 April 2025 Laporan Khusus Medmon Konferensi Pers KKI terkait Pelanggaran Etik dan Disiplin Tenaga Medis

- 21-22 April Laporan Media Monitoring Konferensi Pers Upaya Bersama Pembinaan PPDS RSHS dan Univ. Padjajaran
- 21-23 April 2025 Media Monitoring Terkait Statement IDI terhadap Kemenkes
- 21-23 April 2025 Media Monitoring Pemberitaan Kemenkes akan memberikan SIP Dokter Umum untuk Peserta PPDS
- 29 April 2025 Media Monitoring “Pemindahantugasan Dokter Piprim B Yunuarso”
- 16 Mei 2025 Media Monitoring “Konferensi Pers 121 Guru Besar UI”
- 17 Mei 2025 Media Monitoring terkait Tanggapan Kemenkes Terkait GB FK UI
- 17-23 Mei 2025 Laporan Media Monitoring Isu Jaminan Kesehatan Nasional
- 26 -27 Mei 2025 Pemberitaan Peluncuran Hasil SSGI 2024

Media Monitoring Tools



No.	Avatar	Account Name	Followers	RT + Reply Count	Retweets	Replies
1		@bambangsuling11	638	30,278	30,188	90
2		@dhemis_is_back	29,248	9,823	9,811	12
3		@lutfine13th	307	6,662	6,660	2
4		@DrEvaChaniago	74,740	6,301	6,281	20
5		@niwseir	3,775	6,224	6,221	3

2. Komunikasi Risiko

International Health Regulations (IHR) 2005 menyebutkan bahwa komunikasi risiko merupakan salah satu kapasitas inti yang wajib dibangun dan dijalankan oleh setiap negara anggota *World Health Organization (WHO)* sebagai bagian dari perjanjian global untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan global dalam mendeteksi, merespons, dan menangani ancaman kesehatan masyarakat. Di tingkat nasional, implementasi terhadap IHR, khususnya pada aspek komunikasi risiko, telah dinilai oleh WHO melalui *Joint External Evaluation (JEE)* pada tahun 2017. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar

dilakukan penguatan kapasitas komunikasi risiko hingga ke tingkat daerah/lokal. Sebagai tindak lanjut, Tim Kerja Strategi Komunikasi telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya tersebut. Namun, pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan oleh Tim Kerja Strategi Komunikasi mengalami keterbatasan akibat adanya pemblokiran anggaran, sehingga tim tidak dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri. Partisipasi tim pada tahun tersebut terbatas pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain, serta pelaksanaan kegiatan rutin yang bersifat internal dan operasional. Keterbatasan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan penguatan kapasitas komunikasi risiko sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh WHO.

2) Penanganan Hoaks Kesehatan

Pada 2017, Mastel melakukan penelitian terkait berita bohong atau yang kerap disebut sebagai berita hoaks. Mereka mendapati fakta bahwa 62.10% berita hoaks adalah berupa teks, dan media yang umum digunakan untuk menyebarkannya adalah media sosial serta aplikasi pesan/*chatting*. Keberadaan berita hoaks pada umumnya sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Data Kementerian Kominfo (saat ini KomDigi) hingga 31 Desember 2023 menemukan adanya 12.547 isu hoaks, yang didominasi oleh hoaks sebesar 2.357 isu kesehatan. Isu-isu hoaks tersebut menyebar di berbagai platform digital, seperti Facebook, Instagram, X.com, dan YouTube. Hoaks yang menyangkut kesehatan memang marak beredar di kalangan masyarakat. Begitu masifnya penyebaran hoaks kesehatan di masyarakat, menjadi salah satu ancaman di dalam kelancaran pembangunan kesehatan nasional. Guna mengedukasi publik tentang cara mencari informasi yang benar dan melawan informasi yang sudah beredar dengan informasi yang benar dan kredibel, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes tidak secara aktif sendiri bekerja, akan tetapi *support system* yang dikomandoi oleh Kementerian Kominfo dan organisasi yang aktif memerangi peredaran hoaks seperti Mafindo, cek fakta media, *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *Information and Communication Technology* (ICT) *watch* dan komunitas lainnya.

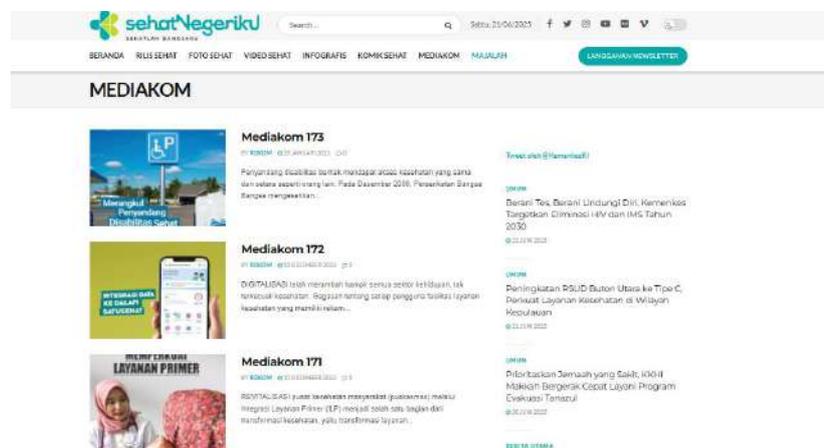
Sebelumnya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik secara rutin bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki alat dan sistem terlisensi dari jaringan pengecekan fakta internasional (IFCN) untuk menjaring dan menangani hoaks, khususnya yang mengatasnamakan institusi Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan. Kolaborasi ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas informasi publik dan merespons disinformasi secara cepat dan akurat. Namun, hingga pertengahan tahun 2025, kegiatan ini

belum dapat berjalan secara optimal akibat adanya pemblokiran anggaran, yang berdampak pada terbatasnya kapasitas operasional dan hambatan dalam pelaksanaan deteksi serta klarifikasi hoaks secara berkelanjutan. Ke depan diperlukan strategi baru di dalam internal Kemenkes, penyediaan sumber daya, penguatan kapasitas dan kerja sama yang lebih erat dalam penanganan hoaks kesehatan. Termasuk untuk kapasitas pelaksana kegiatan komunikasi/kehumasan di daerah.

PUBLIKASI MEDIA

1. Produksi Majalah Mediakom

Perkembangan media sosial tidak serta merta mematikan media konvensional seperti majalah. Majalah yang dulu hadir dalam bentuk cetak bertransformasi menjadi majalah digital atau *e-magazine*. Mediakom terbit setiap bulan yang memiliki rubrik seperti: Media Utama, Serba Serbi, Info Sehat, Peristiwa, Profil, Kilas Internasional, Galeri Foto, Aku Tahu, Pojok Info, Iklan, Isi Piringku, Resensi Buku, dan Resensi Film. *E-magazine* Mediakom yang berbentuk PDF dapat diunduh melalui website Kemenkes yaitu: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/topik/mediakom>

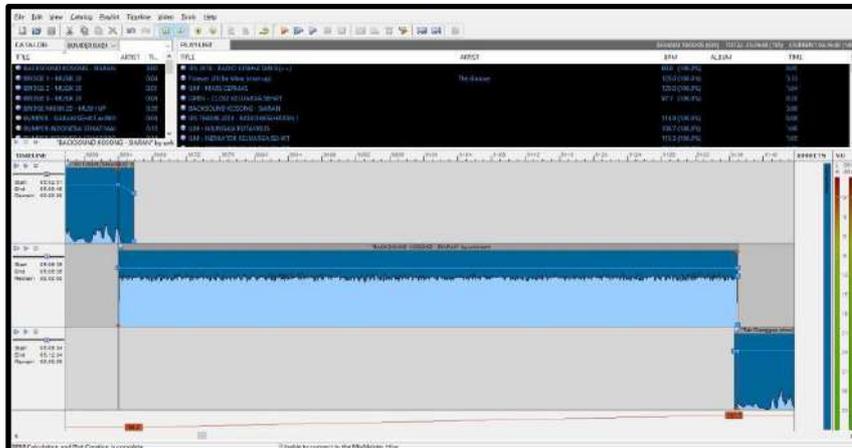


Edisi Mediakom Tahun 2025

Hingga Semester I Tahun 2025, majalah Mediakom yang dapat diterbitkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebanyak satu edisi, yakni Mediakom Edisi 173 pada bulan Januari. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya pelaksanaan kegiatan sejak bulan Februari hingga saat ini, karena anggaran untuk jasa editor dan produksi terdampak pemblokiran anggaran, sehingga proses penerbitan edisi-edisi selanjutnya belum dapat direalisasikan

2. Siaran Radio Kesehatan

Siaran Radio Kesehatan memiliki 9 program yaitu *Talkshow* Keluarga Sehat, *Talkshow* Sehat Wicara, *Talkshow* Eksklusif, Siaran Sehat, Berita Kesehatan, Iklan Layanan Masyarakat, Adlips, Konten Platform Digital & Artikel Web, dan *Podcast*.



software pendukung untuk penjadwalan program siaran

a. Siaran Sehat

Siaran sehat dilakukan secara daring bersama dokter Reisa, membahas tentang kesehatan ataupun berbagi info tentang kesehatan dan secara *live* melalui Instagram Kementerian Kesehatan.

b. Berita Kesehatan

Berita Kesehatan yang dibacakan untuk pendengar Siaran Radio Kesehatan update 3-4 berita setiap hari yang dibagikan melalui Siaran Radio Kesehatan.



c. *Talkshow* Keluarga Sehat

Talkshow Keluarga sehat merupakan *talkshow* yang membahas masalah kesehatan di sekitar lingkungan keluarga dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan, dibawakan

dengan ringan serta melibatkan peran serta dan interaksi (tanya jawab) antara narasumber dan pendengar yang dapat ikuti melalui kanal Instagram.

d. Talkshow Eksklusif

Talkshow bersama Tim Dokter Staf Komunikasi Kemenkes membahas isu atau tips kesehatan. Disiarkan setiap hari Jumat pukul 14.00-15.00 WIB. Dapat diakses melalui Instagram *live* Kemenkes RI dan *streaming* di website radiokesehatan.kemkes.go.id

e. Talkshow Sehat Wicara

Talkshow bersama para *stakeholder* Kementerian Kesehatan RI membahas isu kesehatan. Waktu talkshow disesuaikan dengan jadwal narasumber selama 60 menit. Dapat diakses melalui Aplikasi Radio Kesehatan, streaming radiokesehatan.kemkes.go.id dan IG Live Kemenkes RI

f. Iklan Layanan Masyarakat

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) berisi tentang pesan singkat berupa informasi, atau seruan dan atau ajakan terkait Kesehatan yang disiarkan minimal 27 kali setiap harinya oleh penyiar radio SRK.

ILM - IMUNISASI MR	14/08/2018 12:04 PM	MP3 Format Sound	1,997 KB
ILM - IMUNISASI ROTAVIRUS	14/08/2023 9:06 AM	MP3 Format Sound	946 KB
ILM - JINGLE ASI 1000 HPK	16/12/2021 7:55 AM	MP3 Format Sound	1,184 KB
ILM - JINGLE CERDIK	24/12/2021 7:26 AM	MP3 Format Sound	1,535 KB
ILM - JINGLE OBAT 3 D	28/12/2021 8:24 PM	MP3 Format Sound	889 KB
ILM - JINGLE RESISTENSI OBAT	22/11/2018 10:52 AM	MP3 Format Sound	1,752 KB
ILM - MUDIK SEHAT 3	8/09/2018 10:22 AM	MP3 Format Sound	1,886 KB
ILM - ROKOK	29/12/2021 9:32 AM	MP3 Format Sound	1,820 KB
ILM - TELINGA SEHAT	18/04/2018 7:12 AM	MP3 Format Sound	1,990 KB
ILM ASI EKSKLUSIF	29/12/2021 10:38 AM	MP3 Format Sound	2,558 KB
ILM DIFTERI (1)	18/04/2018 7:13 AM	MP3 Format Sound	681 KB
ILM DIFTERI (2)	18/04/2018 7:12 AM	MP3 Format Sound	1,043 KB
ILM FLU BURUNG (CEGAH)	18/04/2018 7:24 AM	MP3 Format Sound	425 KB
ILM FLU BURUNG (GEJALA)	18/04/2018 7:24 AM	MP3 Format Sound	459 KB
ILM HIV/AIDS	28/12/2021 10:26 AM	MP3 Format Sound	1,016 KB
ILM IMUNISASI	29/12/2021 9:43 AM	MP3 Format Sound	2,529 KB
ILM INDIKATOR SEHAT	29/12/2021 9:33 AM	MP3 Format Sound	2,556 KB
ILM JINGLE TB	16/12/2021 7:19 AM	WAV File	12,034 KB
ILM KEMENKES KANKER - RIA IRRAWAN	18/04/2018 7:13 AM	MP3 Format Sound	2,081 KB
ILM KEMENKES PUSKESMAS	29/12/2021 9:11 AM	MP3 Format Sound	2,074 KB
ILM MAGER	29/12/2021 10:12 AM	MP3 Format Sound	2,630 KB
ILM MEROKOK DI ANGGKUTAN UMUM	18/04/2018 7:25 AM	MP3 Format Sound	762 KB
ILM PSN CEGAH DEB	29/12/2021 9:44 AM	MP3 Format Sound	926 KB
ILM RADIO MALARIA DAN DBD - KEM...	24/04/2018 12:18 PM	MP3 Format Sound	907 KB
JINGLE - KESEHATAN JAWA	8/09/2023 1:06 PM	MP3 Format Sound	4,296 KB
Jingle HPV	12/01/2024 7:21 AM	MP3 Format Sound	2,018 KB
PASCA PEMILU - POLARISASI JADI DIS...	23/02/2024 11:56 AM	MP3 Format Sound	2,731 KB
PSA - MANFAAT JKN KIS	21/05/2018 10:30 AM	MP3 Format Sound	7,075 KB
SPOT MARS GERMAS	24/12/2021 7:02 AM	MP3 Format Sound	1,505 KB

sound file ILM radio

g. Adlibs

Adlibs adalah siaran *live* yang dilakukan di studio SRK dengan menyediakan *script* dan berikut contoh format *script* yang biasanya dibuat oleh penyiar radio SRK.

ADLIBS	
Edisi	PERPUSTAKAAN KEMENKES RI
Pukul	08:00, 11:00, 12:00, 15:00, 17:00 WIB (5x/hari)
Agenda Setting	-
<i>Voice over dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam membaca adlibs.</i>	
Opening	<p>Sobat sehat, buat kamu yang suka membaca buku atau yang lagi cari – cari buku khusus tentang kesehatan?</p> <p>Apalagi kamu yang sedang membutuhkan suasana baru dalam membaca buku? Karena situasi pandemi Covid 19 seperti saat ini.</p> <p>Nah, kamu bisa ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan, yang masih memberikan pelayanan disaat pandemi ini. Melalui www.perpustakaan.kemkes.go.id</p>
The Point	<p>Jadi sobat sehat, Kementerian Kesehatan memiliki perpustakaan khusus yang dapat di manfaatkan oleh pegawai Kementerian Kesehatan dan juga untuk masyarakat umum yang suka membaca.</p> <p>Layanan yang tersedia di Perpustakaan Kementerian Kesehatan itu diantaranya adalah layanan baca tempat, sirkulasi, referensi, dan layanan anak.</p> <p>Selain ada koleksi buku kesehatan tersedia juga koleksi non kesehatannya, seperti buku baru atau best seller, buku anak, novel, majalah, dan juga koran.</p> <p>Oh iya! Semua produk karya cetak dan karya rekam satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan wajib lho, mencantumkan Internasional Standar Book Number (ISBN) dan Katalog Dalam Terbitan (KDT), sesuai dengan yang diamanatkan Permenkes No. 38 tahun 2015 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan</p>

naskah Adlibs

h. Konten Platform Digital & Artikel Web

Untuk konten digital Spotify diupload melalui akun Spotify SRK, sedangkan konten untuk YouTube diupload melalui akun YouTube Kementerian Kesehatan RI.

i. Podcast (KEMENCAST)

Podcast adalah siaran yang menampilkan obrolan seputar kesehatan yang dibawakan secara santai dan disiarkan secara langsung maupun *taping* melalui akun YouTube resmi Kementerian Kesehatan RI, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Untuk Podcast *live*, melibatkan penonton untuk bertanya langsung kepada narasumber dengan pertanyaan yang dapat diajukan melalui kolom komentar.

Podcast Kementerian Kesehatan sendiri bernama **Kemencast** yang bermakna Kementerian Kesehatan Podcast.



Sepanjang Januari - Desember tahun anggaran 2025, berikut jumlah Publikasi Media di Siaran Radio Kesehatan (SRK):

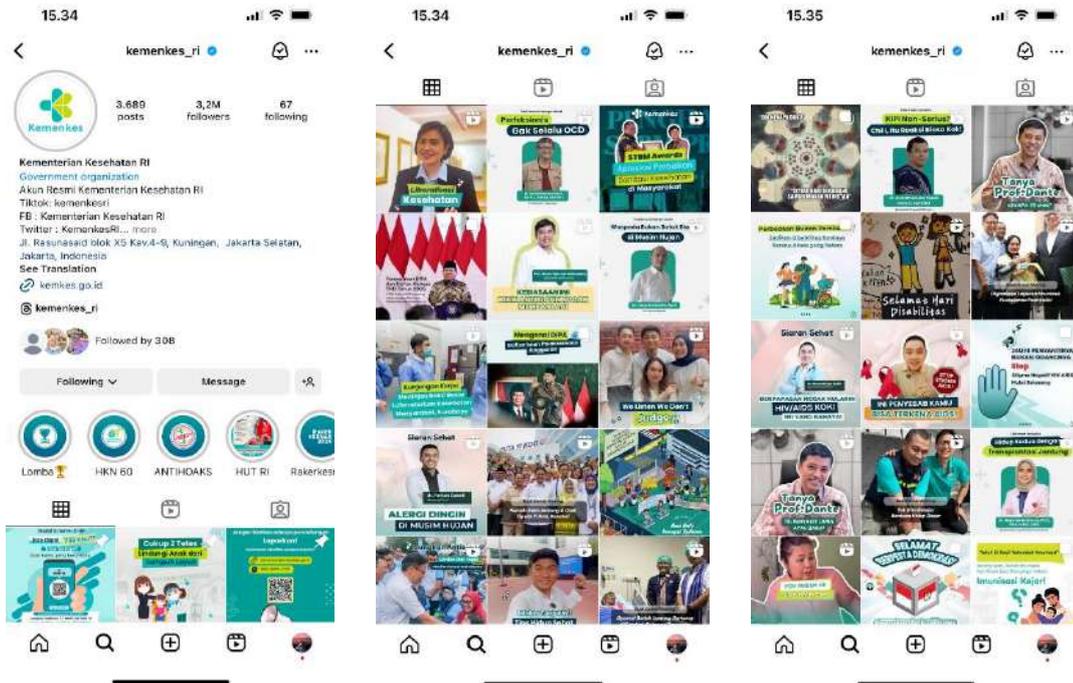
Program Siaran	Bulan					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Jumlah siaran	900	863	566	610	573	

3. Pengelolaan Media Sosial

Tim Kerja Publikasi Media juga mengelola berbagai media sosial diantaranya Instagram, X.com, TikTok, YouTube, dan Facebook, serta WA Channel. Setiap media sosial dikelola untuk menyampaikan berbagai informasi di Kementerian Kesehatan mulai dari kegiatan pimpinan (Menkes, Wamenkes, dan Setjen), ucapan hari-hari besar, serta informasi dan edukasi seputar isu kesehatan lainnya.

a. Instagram

Tim kerja Publikasi Media mengelola media sosial Instagram dengan alamat resmi @kemenkes_ri. Akun Instagram Kemenkes RI berisi informasi video *vertical* dan konten informasi visual berupa poster. Konten video *vertical* berisi tentang recap atau *highlight* kegiatan Menkes atau Wamenkes atau konten video edukasi dan informasi kesehatan. Hingga Juni 2025, akun instagram @kemenkes_ri telah diikuti lebih dari 3,2 juta pengikut dan memposting sebanyak 4.016 ribu postingan.



b. X.com (Twitter)

X.com atau Twitter Kemenkes merupakan saluran yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna media sosial melalui cuitan atau hastag tertentu. Akun X atau X.com Kemenkes adalah @kemenkesRI dan memiliki sekitar 752 ribu lebih pengikut. Akun X sangat berguna untuk memantau isu kesehatan dan membentuk serta mengetahui opini publik terkait isu kesehatan tertentu.



c. TikTok

Akun TikTok adalah akun yang menasar generasi Z dan Alpha, yang sangat menyukai informasi kesehatan yang cenderung ringan dan menghibur. Akun TikTok Kemenkes adalah @kemenkesri dengan jumlah pengikut sebanyak 326.8 ribu pengikut. Konten

yang terdapat pada akun TikTok @kemenkesri adalah konten ringan dan pendek yang umumnya disajikan dalam bentuk audio video.



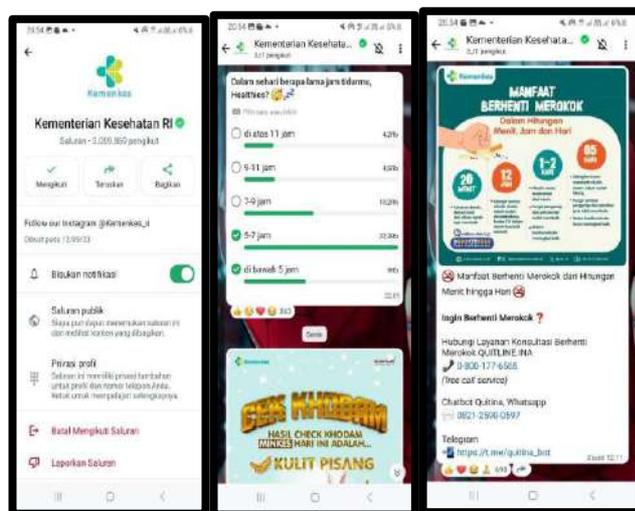
d. Facebook

Facebook adalah salah satu media sosial pertama. Meski ekosistem Facebook tidak seramai Instagram dan TikTok, Kemenkes RI juga memiliki akun Facebook dengan nama Kementerian Kesehatan RI. Informasi yang disajikan dalam akun Facebook pada umumnya duplikasi informasi akun Instagram yang disampaikan dengan narasi pengantar yang berbeda mengikuti gaya media sosial Facebook.



e. WA Channel

WA Channel adalah akun sosial media baru yang terbentuk pada 12 September 2023. Akun ini merupakan akun informasi satu arah yang terdapat dalam WhatsApp di mana pengguna hanya bisa memberikan reaksi pada setiap postingan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Meski terhitung media sosial baru, akun WA Channel Kemenkes dengan nama Kementerian Kesehatan RI telah memiliki lebih dari 3 juta pengikut.



Tim Kerja Publikasi Media secara aktif melakukan produksi dan publikasi berbagai konten pada berbagai ragam media sosial tersebut dengan mengikuti karakteristik media sosial tersebut. Berikut jumlah posting publikasi pada berbagai akun media sosial Kemenkes RI selama periode Januari-Juni 2025.

Jenis Media Sosial	Jumlah Posting dalam Bulan						Jumlah Posting
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
TikTok	19	20	22	18	17	14	110
X.com (X)	238	218	234	222	218	192	1.322
Instagram	199	251	259	205	171	172	1.257
Facebook	134	93	119	73	98	117	634
WA Channel	57	51	52	28	39	73	300

4. Publikasi Q&A melalui *Live Instagram*

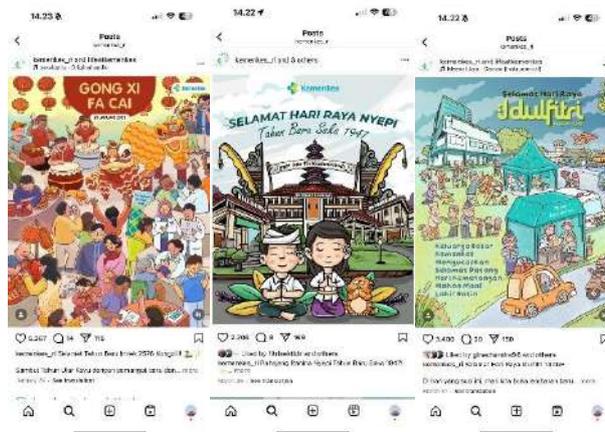
Pada semester I TA 2025, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memanfaatkan media sosial untuk tetap memberikan konten dengan informasi yang ringan dan membuka ruang diskusi bersama *netizen* secara *live*. Program yang dilaksanakan yaitu Instagram Live Q&A yang berkolaborasi dengan para narasumber praktisi yang ahli pada bidangnya sesuai dengan tema yang diangkat.



Live Q&A	Bulan						Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
	0	0	2	1	0	0	10

5. Komik Animasi

Komik animasi merupakan ilustrasi yang dibuat dan disebarluaskan melalui akun media sosial Kemenkes yang bertujuan memberikan ucapan dan informasi dalam kemasan visual yang lebih segar untuk menjaga *engagement follower* media sosial. Komik animasi merupakan bentuk inovasi tim kerja Publikasi Media yang ditujukan untuk menjangkau dan menjaga *engagement* audiens pengikut akun media sosial kemenkes. Komik animasi terdiri ucapan dalam bentuk ilustrasi, isu kesehatan yang dikemas dalam bentuk yang ringan dan disampaikan secara singkat dengan durasi tidak lebih dari dua menit. Berikut contoh postingan Komik animasi pada berbagai akun media sosial Kemenkes.



Berikut jumlah produksi Komik animasi yang dipublikasikan melalui media sosial sepanjang semester I tahun 2025 yang diposting di media sosial Kemenkes:

Jenis Komik Animasi	Jumlah Posting Komik Animasi dalam Bulan						Jumlah Posting
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
Ilustrasi dan Animasi Pendek	3	0	3	2	1	1	10

6. *Live streaming* dan *Short YouTube*

Live streaming dan *Short YouTube* merupakan bagian sarana amplifikasi dan sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes RI. *Live Streaming* YouTube digunakan untuk mensosialisasikan kegiatan besar seperti acara seminar, pertemuan, atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau unit Eselon I di bawah Kementerian Kesehatan.

Sementara *Short* YouTube merupakan tayangan di bawah enam puluh detik atau di bawah satu menit yang berisi kutipan pesan-pesan kunci narasumber yang kompeten terkait isu kesehatan tertentu. *Short* YouTube biasanya berupa potongan hasil wawancara narasumber pada berbagai program yang ditayangkan di media sosial Kemenkes seperti Podcast Kemencast atau Siaran SRK.



Live Streaming dan *short* pada YouTube Kemenkes

JENIS TAYANGAN	Jumlah postingan Per Bulan						Jumlah Posting
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
Live Streaming	8	8	0	2	4	7	29
Short	16	31	15	38	10	32	142

7. Pelibatan *Influencer* di Media Digital

Sejak tahun 2023 dibentuk staf teknis komunikasi transformasi kesehatan yang bertugas melakukan sosialisasi terkait transformasi kesehatan, rancangan Undang-Undang Kesehatan, melakukan komunikasi publik dalam penjelasan isu kesehatan strategis dan sensitif, serta memberikan pandangan kepada Menteri Kesehatan terkait opini publik dalam hal transformasi kesehatan.

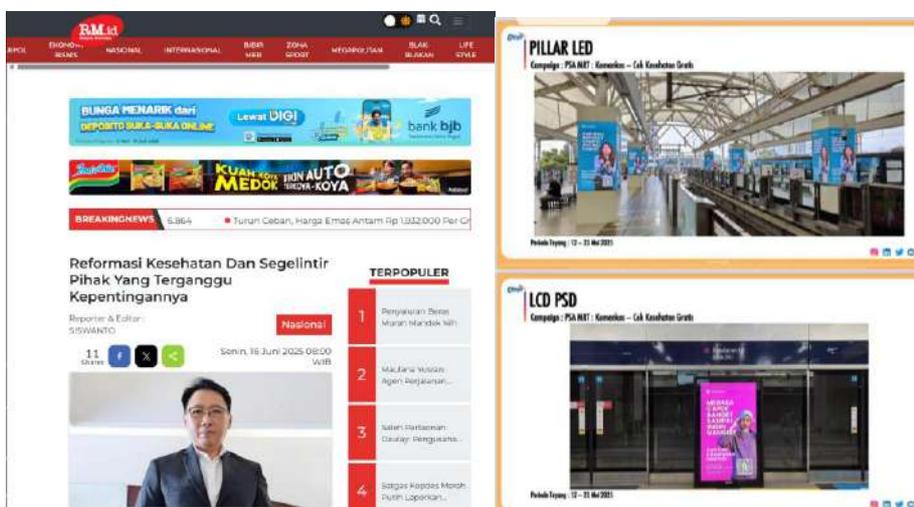
Berikut adalah jumlah siaran yang dilakukan *influencer* atau pemengaruh yang disampaikan di studio Siaran Radio Kesehatan dan disebarluaskan atau ditayangkan melalui akun media sosial Kemenkes RI.

PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI

1. Advertorial Berita Kesehatan di Media Cetak dan Elektronik

Dalam rangka memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan serta program-program prioritas Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan strategi komunikasi melalui pemuatan advertorial

kehatan di berbagai platform media, baik cetak maupun elektronik. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2025, telah diterbitkan sebanyak 63 advertorial di berbagai media nasional, yang memuat pesan-pesan utama seputar transformasi kesehatan, pencegahan penyakit, dan upaya penguatan sistem layanan kesehatan. Selain itu, upaya komunikasi publik juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, seperti pada tahun ini yang menjalin kerja sama dengan Otego dalam bentuk penayangan Public Service Announcement (PSA) digital di moda transportasi MRT. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, yang sekaligus memperluas jangkauan pesan kesehatan ke ruang publik yang strategis.

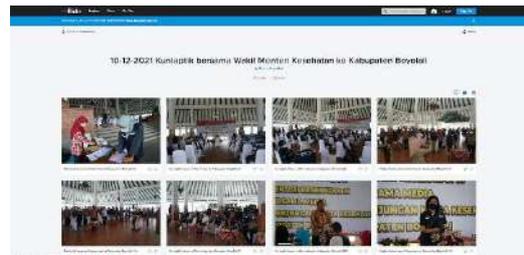


2. Reportase Berita dan Liputan Informasi Berita Kesehatan

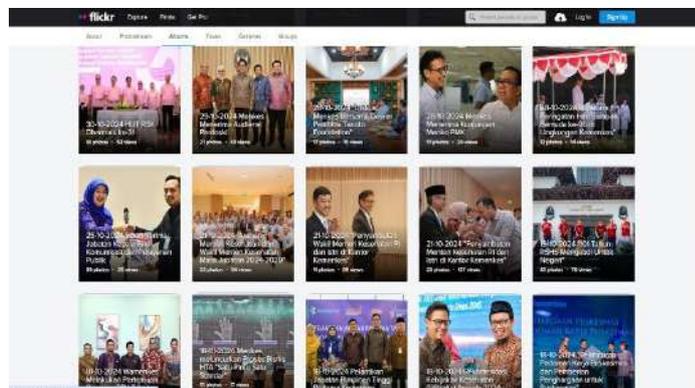
Kementerian Kesehatan telah membokokangun hubungan baik dengan berbagai media nasional maupun internasional. Untuk memfasilitasi media mendapatkan berita terkini bidang kesehatan dari sumber terpercaya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengadakan konferensi pers/ temu media dengan berbagai macam isu/ topik kesehatan. Selain itu, media juga difasilitasi untuk melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lainnya sehingga mereka dapat membuat reportase berita.

Sepanjang semester I TA 2025, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah mengadakan 12 temu media, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
Temu Media	3	0	3	1	0	5	12



Selain reportase bersama rekan media, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat juga meliput dan mendokumentasikan kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan, maupun pejabat lainnya yang mewakili Menteri Kesehatan. Output kegiatan dimaksud berupa album foto di situs *Flickr* Sehat Negeriku, dengan tautan <https://www.flickr.com/photos/sehatnegeriku/albums/>.



Rincian rekap publikasi pada *Flickr* semester I TA 2025

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
Album Flickr	72	77	71	61	61	77	419

Selama periode Januari hingga Juni 2025, telah dibuat sebanyak 419 album foto. Seluruh foto-foto dalam situs *Flickr* Sehatnegeriku bisa diunduh dalam resolusi tinggi dan semua dokumentasi kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan diperbarui secara berkala.

Rincian rekap pameran foto semester I Tahun 2025

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
Pameran Foto	70	0	0	0	0	0	70

Biro Komunikasi dan Informasi Publik secara rutin menyelenggarakan pameran foto sebagai bentuk diseminasi informasi dan dokumentasi visual kegiatan Kementerian Kesehatan. Pameran ini biasanya dipajang di lorong lantai 1 dan lantai 2 gedung utama, serta turut ditampilkan dalam rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional. Namun, pada tahun ini terjadi pemblokiran anggaran untuk kegiatan tersebut, sehingga output yang dihasilkan hanya berupa 70 foto pada bulan Januari..

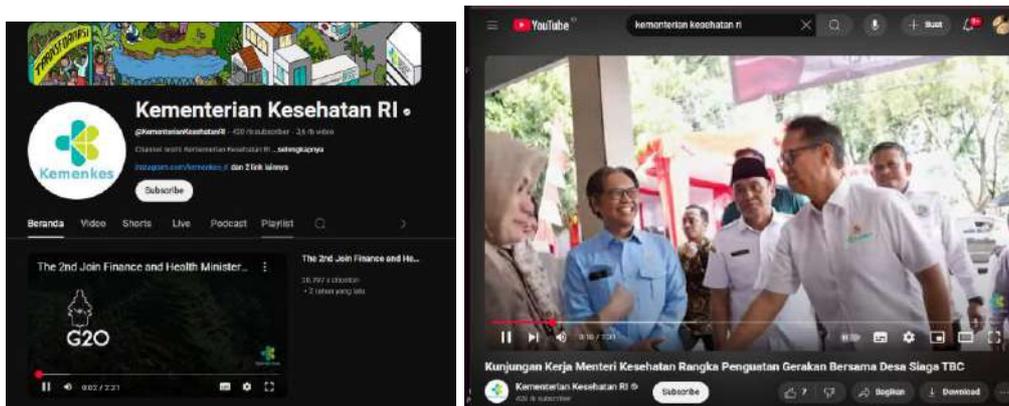
Selain dokumentasi foto, Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga mempublikasikan video kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan, maupun video liputan hasil pembangunan kesehatan. Output kegiatan yang dimaksud berupa video liputan, termasuk video live streaming YouTube yang dapat disaksikan pada tautan <https://www.youtube.com/@KementerianKesehatanRI>. Selama kurun waktu satu tahun, video liputan yang diunggah di kanal YouTube Kementerian Kesehatan sebanyak 249 video dan terdapat sebanyak 235 *live streaming* YouTube.

Rekap video liputan dan live streaming youtube semester I tahun 2025

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Video Liputan	21	11	20	9	13	4	78
Live Streaming	8	8	0	2	4	7	29

*) Data per tanggal 15 Juni 2025



Dalam rangka penyampaian pesan sebagai pimpinan Kementerian Kesehatan maupun secara personal, dan juga penyebaran informasi kesehatan secara masif yang tidak dapat dihadiri secara langsung, maka Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, maupun pimpinan lainnya memanfaatkan fasilitas *videotaping* atau perekaman video. Permohonan untuk *videotaping* ini tidak hanya datang dari internal Kementerian Kesehatan, tapi juga dari pihak eksternal yang merupakan *stakeholder* Kementerian Kesehatan. Untuk itu, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah melakukan *videotaping* atau perekaman video terhadap pimpinan, sesuai dengan hasil koordinasi dengan protokol pimpinan untuk jadwal pelaksanaan *videotaping*. Adapun rekapitulasi dari pelaksanaan taping selama semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rekap taping semester I TA 2025

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
Taping	11	9	12	8	14	3	57

*) Data per tanggal 15 Juni 2025

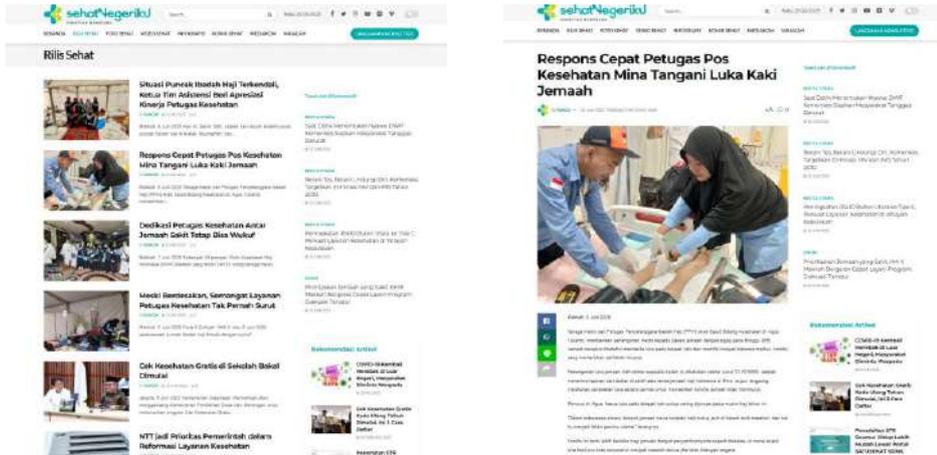


3. Publikasi Berita di Website Kemenkes

Publikasi pemberitaan terkait dengan Kebijakan dan Program Kementerian Kesehatan kepada masyarakat telah dikembangkan melalui situs resmi Kementerian Kesehatan yaitu sehatnegeriku.kemkes.go.id sejak tahun 2015. Publikasi ini bertujuan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat dan media massa serta meningkatkan jumlah pemberitaan positif di media massa.

Selama semester I tahun 2025 sebanyak 187 rilis yang telah diterbitkan di website sehatnegeriku.kemkes.go.id dan kemkes.go.id. Rilis yang diterbitkan terdiri dari pemberitaan kegiatan Kementerian Kesehatan yang merupakan implementasi dari 6 pilar transformasi Kesehatan yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

Informasi mengenai pemberitaan tersebut disiarkan melalui rilis sebagai bahan bagi wartawan atau Masyarakat umum. Tulisan yang diangkat sangat beragam, mulai dari perkembangan kebijakan dan peraturan terkini Kementerian Kesehatan, perjalanan dan capaian enam pilar transformasi kesehatan, Berbagai kegiatan Kementerian Kesehatan seperti kunjungan Menkes dan Presiden dalam rangka peninjauan fasilitas pelayanan Kesehatan di sejumlah RSUD dan berbagai informasi berita lainnya.



Hasil rilis pemberitaan yang di unggah di halaman sehatnegeriku.kemkes.go.id

Selama rentang semester I, rilis pemberitaan yang ditayangkan melalui halaman kemkes.go.id maupun sehatnegeriku.kemkes.go.id di seringkali menjadi acuan wartawan dari berbagai media untuk menulis berita. Berikut *breakdown* jumlah rilis yang dihasilkan dalam satu semester.

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
Rilis Berita	28	19	25	26	61	28	187

PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Institusional (PEKPPP Mandiri)

Melalui Surat Edaran Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik kepada 36 UPT yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk melakukan Praktek baik Penguatan Pelayanan Publik. Adapun pendekatan praktek baik pelayanan publik tersebut pada 6 unsur komponen yang akan dievaluasi mulai Kebijakan Pelayanan Publik, Profesionalisme SDM, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pengelolaan Pengaduan dan SP4N LAPOR, Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana. Progres kegiatan saat ini tengah berlangsung dengan fokus pada pemantauan terhadap 36 UPT (Unit Pelaksana Teknis). Pemantauan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Seluruh rangkaian kegiatan ditargetkan selesai dengan hasil penilaian akhir pada bulan Oktober.

3. Pelaksanaan Penyusunan Indek Pelayanan Publik (IPP) Kemenkes

Penyusunan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian Kesehatan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan publik yang diberikan oleh unit-unit pelayanan di bawah koordinasi Kementerian. Pada tahun berjalan, pelaksanaan IPP melibatkan **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** yang telah **ditunjuk sebagai wakil resmi Kementerian Kesehatan** untuk mewakili institusi dalam penilaian nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Pemilihan UPT perwakilan ini mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti kesiapan layanan, kinerja sebelumnya, serta representasi wilayah dan jenis layanan. Proses penyusunan dan pengisian IPP tidak dilaksanakan secara mandiri oleh UPT, melainkan dengan **pendampingan intensif** dari KemenpanRB, **Biro Komunikasi dan Informasi Publik** selaku koordinator komunikasi publik di Kementerian Kesehatan, serta **unit utama pembina teknis** yang membawahi UPT bersangkutan.

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan yang diukur — mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi, dan pengaduan — dipahami secara menyeluruh oleh UPT dan dipenuhi sesuai dengan standar nasional. Kolaborasi multipihak ini juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Kesehatan secara menyeluruh, serta menciptakan keseragaman standar pelayanan lintas unit.

PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengelolaan Halo Kemenkes

Upaya pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik merupakan komitmen yang kuat untuk memberikan transparansi dan akses yang lebih luas terhadap informasi kesehatan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaksanakan inisiatif yang signifikan melalui akses layanan informasi pttb publik yang diberi nama **Halo Kemenkes**.



Logo Halo Kemenkes

Kementerian Kesehatan melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengembangkan Halo Kemenkes 1500567 yang bertujuan untuk memberikan layanan pengaduan dan informasi secara cepat dan cermat yang diperlukan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui *hotline* 1500567.

Halo Kemenkes adalah sebuah layanan terintegrasi yang inovatif dan revolusioner, menghadirkan pengalaman pelayanan pengaduan dan informasi di bidang kesehatan yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat. Dengan memadukan berbagai kanal komunikasi seperti telepon, SMS, email, layanan ini dijalankan melalui aplikasi bernama *Ecentrix*.

Pemanfaatan Halo Kemenkes tidak terbatas hanya pada masyarakat dalam negeri, melainkan juga membuka akses dan memberikan layanan kepada masyarakat yang berada di luar negeri.



Petugas Halo Kemenkes dalam memberikan layanan

a. Layanan Telepon 1500567

Halo Kemenkes telah menyediakan layanan yang responsif dengan waktu operasional selama 24 jam sehari. Namun, perlu diperhatikan bahwa mulai bulan Mei 2023, terdapat penyesuaian jadwal layanan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Saat ini, Halo Kemenkes beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus

memberikan kesempatan bagi tim Halo Kemenkes untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan layanan demi kepuasan pengguna yang lebih baik. Jumlah telepon yang dilayani dalam periode Januari hingga Juni 2025 adalah sebanyak 22.551 layanan dengan status *closed*.

BULAN	INFORMASI			ASPIRASI/SARAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE				
Januari	0	0	5676	0	0	1	0	0	5677	5677
Februari	0	0	5743	0	0	0	0	0	5743	5743
Maret	0	0	3500	0	0	0	0	0	3500	3500
April	0	0	2919	0	0	0	0	0	2919	2919
Mei	0	0	3407	0	0	0	0	0	3407	3407
Juni	0	0	1305	0	0	0	0	0	1305	1305
Juli										
Agustus										
September										
Oktober										
November										
Desember										
JUMLAH	0	0	22550	0	0	1	0	0	22551	22551

Data Jumlah Layanan Telepon Halo Kemenkes Januari – Juni 2025

b. Layanan WhatsApp

Layanan informasi dan pengaduan WhatsApp mulai diperkenalkan sejak awal Januari 2019 dengan nomor layanan 08126050056. Layanan WhatsApp hanya beroperasi pada hari kerja dari Senin hingga Jumat.

Layanan WhatsApp ini difokuskan untuk pengguna layanan telepon Halo Kemenkes yang ingin mengirimkan data pendukung terkait permohonan informasi atau pengaduan. Selain itu, layanan WhatsApp juga berfungsi sebagai sarana bagi agen Halo Kemenkes untuk menyampaikan informasi lebih lanjut kepada pengguna layanan telepon Halo Kemenkes. Saat ini, layanan WhatsApp tidak terintegrasi dalam sistem *omnichannel* Halo Kemenkes, sehingga kegiatan eskalasi atau tindak lanjut yang menggunakan layanan WhatsApp ini tidak tercatat secara otomatis oleh sistem.

c. Layanan *Short Messaging Service* (081281562620)

Pada semester I TA 2025, layanan *Short Messaging Service* (SMS) melalui Halo Kemenkes tetap menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk memperoleh informasi dalam bidang kesehatan. Data menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 1.045 permintaan informasi yang telah berhasil ditangani melalui SMS, dengan status layanan yang ditutup (*closed*).

BULAN	INFORMASI			ASPIRASI/SARAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE				
Januari	0	0	152	0	0	0	0	0	152	152
Februari	0	0	113	0	0	0	0	0	113	113
Maret	0	0	238	0	0	0	0	0	238	238
April	0	0	231	0	0	0	0	0	231	231
Mei	0	0	207	0	0	0	0	0	207	207
Juni	0	0	104	0	0	0	0	0	104	104
Juli										
Agustus										
September										
Oktober										
November										
Desember										
JUMLAH	0	0	1045	0	0	0	0	0	1045	1045

Data Jumlah Pengguna Layanan SMS Halo Kemenkes Periode Januari-Juni 2025

Jumlah permintaan yang signifikan ini juga menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan SMS dalam menyediakan jawaban yang tepat terkait isu-isu kesehatan.

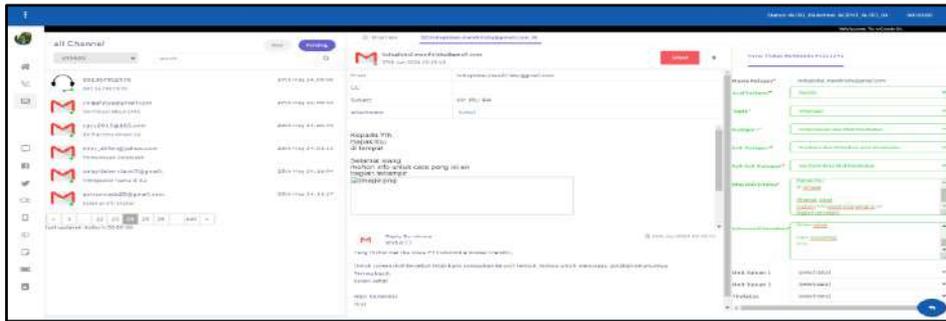
d. Layanan Email (kontak@kemkes.go.id)

Email merupakan salah satu layanan yang telah diintegrasikan dalam aplikasi *Ecentrix*. Selama periode Januari hingga Juni tahun 2025 telah dilakukan pelayanan sebanyak 5.238 email dengan permintaan informasi, pengaduan dan saran dari masyarakat dengan status *closed*.

BULAN	INFORMASI			ASPIRASI/SARAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE				
Januari	0	0	844	0	0	1	0	0	845	845
Februari	0	0	1042	0	0	0	0	0	1042	1042
Maret	0	0	788	0	0	1	0	0	789	789
April	0	0	854	0	0	0	0	0	854	854
Mei	0	0	991	0	0	0	0	0	991	991
Juni	0	0	717	0	0	0	0	0	717	717
Juli										
Agustus										
September										
Oktober										
November										
Desember										
JUMLAH	0	0	5236	0	0	2	0	0	5238	5238

Data Jumlah Pengguna Layanan email Halo Kemenkes Periode Januari – Juni Tahun 2025

Pemanfaatan email sebagai sarana komunikasi mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan pemerintah, khususnya dalam konteks kesehatan. Jumlah email yang signifikan mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam berkontribusi, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan melalui kanal ini.



Tampilan Dashboard Ecentrix untuk Service Level Monitoring

Dashboard pemantauan tingkat layanan (*service level*) dalam aplikasi *Ecentrix* aktif digunakan untuk memonitor tingkat layanan pada kanal telepon, email dan SMS. Hal ini memungkinkan petugas untuk menjaga tingkat layanan tetap di atas 90%.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan Halo Kemenkes, telah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sepanjang tahun 2024. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terhadap pelanggan Halo Kemenkes yang menggunakan layanan kanal telepon, surat elektronik maupun layanan pesan singkat. Kuesioner diisi oleh responden yang diharapkan mampu menjadi perwakilan pelanggan Halo Kemenkes terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas Halo Kemenkes kepada pelanggan yang membutuhkan pelayanan. SKM ini dilakukan dengan metode kuesioner yang terdiri atas 9 pertanyaan yang terdiri dari 9 unsur SKM yang relevan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Halo Kemenkes tahun 2025. Namun pada saat ini masih dalam proses pengumpulan data dari responden.

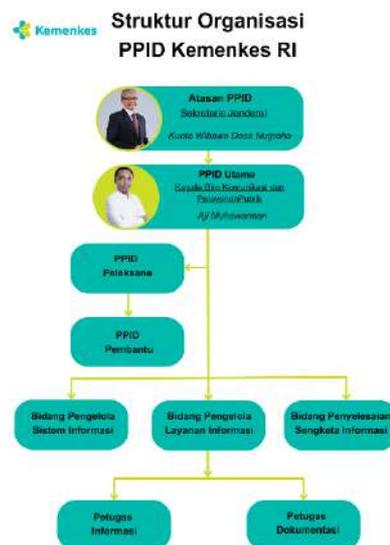
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan Koordinasi PPID

Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi serta bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.

Penunjukan PPID adalah kewenangan pimpinan badan publik yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. PMK No. 37 Tahun 2019 dan Kepmenkes No. 1279 Tahun 2023 menjadi dasar tugas dan fungsi PPID dalam mengelola informasi publik di Kementerian Kesehatan. Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/1991/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, PPID Kemenkes terdiri atas:

- PPID Pelaksana;
- PPID Pembantu;
- Koordinator Pelayanan Informasi;
- Koordinator Dokumentasi; dan
- Petugas Layanan Informasi



Layanan permohonan informasi publik menjadi garis terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Petugas Informasi sebagai perpanjangan tangan PPID melaksanakan fungsi layanan serta melaksanakan pengujian konsekuensi yang akan dikecualikan serta pembuatan pertimbangan tertulis apabila dikecualikan ataupun ditolak.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Kesehatan telah memanfaatkan teknologi informasi melalui website PPID yang tersedia pada <https://ppid.kemkes.go.id/>. Website PPID Kementerian Kesehatan telah diterapkan sejak tahun 2011 dengan pengembangan dan penyesuaian yang terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan di seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kesehatan.

a. Pelayanan Informasi - Pojok Informasi

Berikut adalah Pelayanan Informasi yang ada di Pojok Informasi berdasarkan Jumlah Pengunjung di Gedung Prof.Sujudi Lantai 1 Tahun 2024

BULAN	INFORMASI			SARAN			PENGADUAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE			
Januari	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Februari	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Marat	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
April	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Mei	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Juni	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Juli										0	0	0
Agustus										0	0	0
September										0	0	0
Oktober										0	0	0
November										0	0	0
Desember										0	0	0
JUMLAH	0		34	0		0	0		0	0		34

Berdasarkan matriks di atas jumlah permohonan informasi melalui pojok sampai dengan semester I TA 2025 ssebanyak **38 permohonan informasi**.

b. Instagram @ppid_kemenkes

BULAN	INFORMASI			ASPIRASI/SARAN			PENGADUAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE			
Januari	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Februari	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Maret	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
April	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Mei	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Juni	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Juli										0	0	0
Agustus										0	0	0
September										0	0	0
Oktober										0	0	0
November										0	0	0
Desember										0	0	0
JUMLAH	0		55	0		0	0		0	0		55

Berdasarkan matriks di atas jumlah pelayanan informasi melalui kanal Instagram PPID sampai dengan semester I TA 2025 sebanyak 55 postingan.

c. Email PPID

BULAN	INFORMASI			ASPIRASI/SARAN			PENGADUAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE				
Januari	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Februari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Mei	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Juni										0	0	0	0
Juli										0	0	0	0
Agustus										0	0	0	0
September										0	0	0	0
Oktober										0	0	0	0
November										0	0	0	0
Desember										0	0	0	0
JUMLAH	0		5	0		0	0		0	0		5	6

Berdasarkan tabel di atas jumlah permohonan informasi melalui email PPID pada semester I TA 2025 sebanyak 5 permohonan informasi dengan status *Closed*.

d. Surat

BULAN	INFORMASI			SARAN/ASPIRASI			PENGADUAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE				
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Juni										0	0	0	0
Juli										0	0	0	0
Agustus										0	0	0	0
September										0	0	0	0
Oktober										0	0	0	0
November										0	0	0	0
Desember										0	0	0	0
JUMLAH	0		1	0		0	0		0	0		1	

Berdasarkan tabel di atas jumlah permohonan informasi melalui surat pada tahun semester I TA 2025 sebanyak 1 permohonan informasi dengan status *Closed*.

Berdasarkan tabel di atas jumlah permohonan informasi baik dari Pojok Informasi, Instagram, Email, Website, dan Surat berjumlah **99 permohonan informasi** (diberikan semua 179 permohonan, diberikan sebagian 4 permohonan dan tidak diberikan 4 permohonan).

11. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) PPID Kemenkes Tahun 2025

Dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan kegiatan *Sosialisasi Keterbukaan Informasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Kesehatan Tahun 2025*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola informasi di unit-unit kerja Kemenkes dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Semester I, kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025 dengan melibatkan perwakilan PPID Pelaksana dari berbagai unit utama dan UPT Kemenkes. Sosialisasi ini membahas prinsip-prinsip keterbukaan informasi, mekanisme pelayanan informasi publik, serta strategi peningkatan kualitas layanan informasi yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dan perluasan jangkauan pemahaman, kegiatan sosialisasi akan kembali dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 mendatang. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh jajaran PPID di lingkungan Kemenkes dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi secara optimal.



12. Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!)

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengembangkan akses pengaduan dan permintaan masyarakat melalui Unit Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**LAPOR**) yang saat ini dikelola oleh KemenPAN RB, Kominfo, Kemendagri dan Ombudsman RI. Selama Januari – Juni 2025 tercatat Kementerian Kesehatan (Admin Instansi) telah melakukan disposisi dengan total **172** layanan dengan rata-rata status *close* (**87,21%**) yang diselesaikan oleh admin Unit Utama dan UPT.

BULAN	PERMINTAAN INFORMASI			SARAN/ASPIRASI			PENGADUAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	JUMLAH	% (PROSES+CLOSE/TOTAL LAYANAN*100%)
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE					
Januari	1	4	2	3	3	3	4	12	5	8	19	10	37	77,78
Februari	0	1	2	0	1	0	2	14	7	2	16	5	27	77,79
Maret	2	2	3	1	4	2	1	6	19	4	12	24	40	77,80
April	0	0	0	1	0	4	4	17	7	4	18	7	29	77,81
Mei	0	0	4	0	2	0	2	10	8	2	12	12	26	92,3
Juni	0	0	0	0	0	0	2	11	0	2	11	0	13	84,61
Juli													0	
Agustus													0	
September													0	
Oktober													0	
November													0	
Desember													0	
JUMLAH	3	7	11	4	11	5	15	70	46	22	88	62	172	87,21

HUBUNGAN MEDIA DAN KELEMBAGAAN

1. Pendampingan Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI

Salah satu tugas Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan Kehumasan adalah penyiapan dan pendampingan dalam Raker/ RDP/ Ratas Program Kesehatan dan acara kelembagaan lainnya. Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan Kehumasan bertugas koordinasi penyiapan agenda, koordinasi penyiapan raker, menyiapkan pendampingan, membuat *briefnote*, menggandakan bahan, hingga penyiapan jalannya rapat kerja. Sampai dengan semester I TA 2025 Hubungan Media dan Kelembagaan telah melakukan pendampingan 32 Raker/ RDP/Ratas Program Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	Bulan	URAIAN
1.	Januari	Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI (Pusat Kesehatan Haji) Pembahasan Komponen Biaya Kesehatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/ 2025 M, 3 Januari 2025
2.	Februari	<p>1. Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, tanggal 5 Februari 2025, pembahasan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi Belanja APBN 2025 dari Kemenkes RI b. Pergeseran anggaran Quick Wins di lingkungan Kementerian Kesehatan RI <p>2. Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI, tanggal 11 Februari 2025, pembahasan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2025. b. Membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan <p>3. Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI tanggal 12 Februari 2025, pembahasan terkait Pembahasan Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025</p>
3.	Maret	Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Kesehatan Lanjutan) tanggal 18 Maret 2025, terkait Penanganan Bantuan Medis Korban
4.	April	<p>4. Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI, 29 April 2025. Pembahasan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan isu – isu krusial di sektor kesehatan, permasalahan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) termasuk evaluasi sistem pendidikan pembiayaan, distribusi peserta didik, dan kejelasan status hubungan kerja.

		<p>b. Persiapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji tahun 2025, mencakup kesiapan tenaga kesehatan, logistik obat dan alat kesehatan, serta koordinasi lintas sektor untuk menjamin pelayanan yang optimal bagi jemaah haji Indonesia.</p> <p>5. Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI, 30 April 2025. Pembahasan terkait :</p> <p>a. Membahas permasalahan pelanggaran kode etik dan disiplin kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>c. Membahas penguatan system pengaduan dan perlindungan korban di sektor kesehatan dan pendidikan;</p> <p>d. Membahas transformasi kebijakan penguatan profesionalisme tenaga medis.</p>
5.	Mei	<p>1. Rapat Panja Komisi IX DPR RI bersama Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas RI, Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Tanggal 7 Mei 2025. Pembahasan terkait :</p> <p>a. Kebijakan Program Percepatan Eliminasi Tuberculosis</p> <p>b. Anggaran Program Penaggulangan Tuberculosis</p> <p>c. Roadmap Percepatan Program Eliminasi Tuberculosis hingga 2030</p> <p>2. Rapat Panja Komisi IX DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes RI terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional, tanggal 7 Mei 2025, Pembahasan terkait Kepesertaan dan Kepatuhan luran</p> <p>3. Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI Tanggal 14 Mei 2025. Pembahasan terkait:</p> <p>a. Perkembangan Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), termasuk sinkronisasi dengan RPJMN 2025 – 2029 dan perumusan prioritas transformasi sistem kesehatan nasional;</p> <p>b. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.</p>

		<p>4. Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI tanggal 26 Mei 2025. Pembahasan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membahas Evaluasi Mekanisme Pembayaran ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan, termasuk Laporan Dispute Klaim, Klaim yang Pending, dibatalkan dan belum dibayarkan; b. Membahas Kebijakan Pelayanan Kesehatan Program JKN; c. Membahas Kesiapan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
--	--	---



Dokumentasi Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI

Selain pendampingan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan kehumasan juga mengkoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan. Pada semester I tahun 2025 Tim Kerja Komunikasi antar Lembaga dan Penguatan kehumasan telah mengkoordinasikan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan. Rincian kegiatan Kunjungan Kerja adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Program	6 s.d. 8 Februari 2025

	Pemeriksaan Kesehatan Gratis, di Provinsi Kalimantan Selatan	
2	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, di Provinsi Sulawesi Tengah	6 s.d. 8 Februari 2025
3	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, di Provinsi Gorontalo	6 s.d. 8 Februari 2025
4	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan Makanan dan Minuman menjelang bulan Ramadhan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur	3 s.d 5 Juni 2024
5	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan Makanan dan Minuman menjelang bulan Ramadhan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Bara	27 Februari s.d 1 Maret 2025
6	Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendapat masukan terkait Pembahasan Panja Pengawasan terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat	27 Februari s.d 1 Maret 2025
7	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan Makanan dan Minuman menjelang bulan Ramadhan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2025	27 Februari s.d 1 Maret 2025
8	Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Kesehatan Lanjutan) tanggal 18 Maret 2025, terkait Penanganan Bantuan Medis Korban	18 Maret 2025
9	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Denpasar Provinsi Bali, 12 s.d 16 April 2025	12 s.d. 16 April 2025
10	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, 12 s.d 16 April 2025	12 s.d. 16 April 2025

11	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, 12 s.d 16 April 2025	12 s.d. 16 April 2025
12	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait dengan Pengawasan Pelaksanaan Haji tahun 2025 ke Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 7 s.d 9 Mei 2025	7 s.d. 9 Mei 2025
13	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait dengan Pengawasan Pelaksanaan Haji tahun 2025 ke Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 7 s.d 9 Mei 2025	7 s.d. 9 Mei 2025
14	Kunjungan Kerja Panja Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan mengenai Percepatan Eliminasi Tuberculosis ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 22 s.d 24 Mei 2025	22 s.d. 24 Mei 2025
15.	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 s.d 29 Mei 2025	27 s.d. 29 Mei 2025
16.	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Kota Manokwari Provinsi Papua Barat 27 s.d 29 Mei 2025	27 s.d. 29 Mei 2025
17.	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 s.d. 3 Juni 2025	2 s.d. 3 Juni 2025



2. **Media Coaching bagi Pejabat/Pimpinan Kementerian Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 menjelaskan bahwa ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Dalam rangka pengembangan kompetensi dan keterampilan ASN Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melakukan kegiatan *media coaching* bagi pejabat/pimpinan Kementerian Kesehatan melalui pembekalan teori dan

praktik kiat dan teknik *public speaking* serta *media handling* dalam berhadapan dengan media/wartawan.

Sebagai pejabat publik dan figur yang akan menjadi perwakilan dari institusinya, diperlukan untuk bisa mengenal dan memahami bagaimana sebenarnya cara kerja media, baik itu media massa maupun sosial media. Dengan demikian, kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat. Hal ini hanya dapat terjadi jika para perumus dan pelaksana kebijakan mendapatkan referensi dan pemahaman yang benar terkait urgensi komunikasi publik dalam pengambilan keputusan, serta memiliki kapasitas yang mumpuni terkait dengan bidang komunikasi.

Oleh karena itu dibutuhkan keahlian dan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan potensi informasi yang *misleading* dan menyebabkan isu bagi lembaga bersangkutan. Dapat disimpulkan pelaksanaan *Media Coaching* bagi Pejabat/Pimpinan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

- a) Mengetahui dan meningkatkan kapasitas pejabat dalam menghadapi wartawan/media, baik Menkes, Wamenkes, eselon I, eselon II, Juru Bicara, maupun pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pusat Kemenkes.
- b) Menyiapkan para pejabat/pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat menjadi komunikator yang efektif, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan yang beragam, mulai dari media, masyarakat, pemerintah, legislatif, sektor swasta dan lainnya.

Dalam rangka memberikan pembekalan teori dan praktik kepada peserta mengenai kiat dan teknik *media handling*, *personal branding*, dan *public speaking* yang pada umumnya terdapat 4 komponen utama kegiatan ini yaitu:

- a) *Review*: menggali pengalaman peserta dalam menghadapi media;
- b) Simulasi wawancara *doorstop*, wawancara via telepon, dan *talkshow* di media penyiaran;
- c) Penyampaian materi tentang landscape media dan komunikasi efektif yang disampaikan oleh redaktur media dan pakar komunikasi.
- d) Evaluasi dan penyampaian umpan balik bagi peserta.

Hingga Juni 2025, pelaksanaan kegiatan media coaching belum dapat direalisasikan karena terdapat pemblokiran anggaran pada unit kerja terkait. Kondisi ini berdampak pada

tertundanya seluruh tahapan persiapan, termasuk koordinasi narasumber, penyusunan materi, serta pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

4. Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan di Media Konvensional (*Talkshow* TV/Radio)

Pada pelaksanaan kegiatan pertama, anggaran mengalami efisiensi yang menyebabkan tidak adanya penempatan (placement) publikasi, sehingga sosialisasi program Kementerian Kesehatan tidak dapat disampaikan melalui media televisi dan radio. Kondisi ini sempat membatasi jangkauan informasi kepada masyarakat luas. Namun, saat ini anggaran telah dibuka blokir, sehingga pelaksanaan placement publikasi dapat difasilitasi kembali di sosialisasi berikutnya untuk mendukung penyebarluasan informasi program-program prioritas Kementerian Kesehatan



5. Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Korwil Provinsi Bali

Terdapat empat kegiatan situasional yang telah melibatkan Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas direktif pimpinan dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah, khususnya di Provinsi Bali. Namun, hingga saat ini pelaksanaan kegiatan koordinasi wilayah (korwil) di Provinsi Bali belum terealisasi dan baru dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Semester II tahun berjalan. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan serta Tim Kerja Penguatan Pelayanan Publik, guna memastikan efektivitas komunikasi serta penguatan tata kelola pelayanan di wilayah tersebut.

KOMUNIKASI INTERNAL DAN KEHUMASAN

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Komunikasi Internal

Perubahan budaya kerja secara resmi diperkenalkan pada tanggal 19 Februari 2024, ditandai dengan peluncuran Pedoman Budaya Kerja dan Pedoman Identitas Kemenkes sebagai upaya akselerasi terwujudnya Transformasi Internal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Culture Transformation Office (CTO) Kemenkes, memfokuskan basis *core values* BerAKHLAK tersebut pada tiga tema perubahan budaya kemenkes yaitu: Eksekusi Efektif (*Effective Execution*); Cara Kerja Baru (*New Ways of Working*); dan Pelayanan Unggul

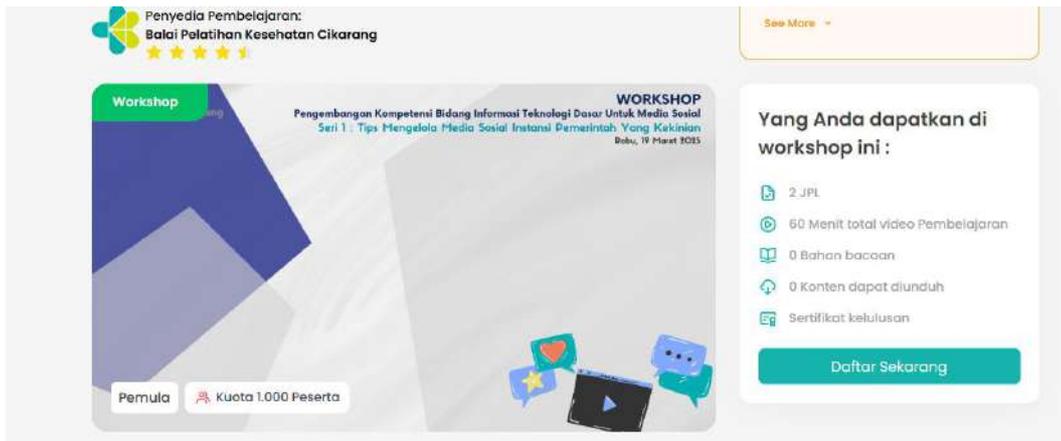
(*Service Excellence*). Tiga tema perubahan budaya kerja ini menjadi visi perubahan budaya kerja Kemenkes yang diharapkan dapat dijalankan oleh seluruh insan Kemenkes sebagai pelaku transformasi.



Oleh karenanya, internalisasi kepada pegawai Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting dilaksanakan dalam rangka membangun awareness dan dukungan terhadap program transformasi sistem kesehatan maupun program prioritas lainnya. Sebagai bentuk penyebarluasan informasi yang masif dan intensif terkait program transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan serta pelaksanaan Transformasi Internal kepada seluruh ASN Kementerian Kesehatan, maka diperlukan adanya bimbingan teknis (Bimtek) terkait optimalisasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Transformasi Kesehatan sampai pada UPT Kemenkes.

Namun, pada Semester I Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan akibat adanya pemblokiran anggaran yang terkait dengan revisi perencanaan strategis Kementerian Kesehatan periode 2025–2029. Kondisi ini menyebabkan tertundanya sejumlah kegiatan pengembangan kapasitas, termasuk Bimtek Pengelolaan Komunikasi Internal.

Sebagai bentuk adaptasi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia, pada bulan Maret 2025 Biro Komunikasi dan Informasi Publik memanfaatkan undangan sebagai narasumber dari Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang untuk menyelenggarakan *Workshop Pengelolaan Komunikasi Internal dalam Pengelolaan Media Sosial*. Kegiatan ini menjadi ruang alternatif untuk tetap menyampaikan materi pengelolaan komunikasi internal kepada para peserta pelatihan, dengan fokus pada praktik komunikasi melalui kanal digital.



Workshop Pengembangan Kompetensi Bidang Informasi Teknologi Dasar untuk Media Sosial:
Edisi Tips Mengelola Media Sosial Instansi Pemerintah yang Kekinian

2. Diforkin Award (Festival Konten Budaya Kerja)

Dalam rangka mendorong efektivitas internalisasi dan percepatan diseminasi informasi Budaya Kerja baru, maka dilakukan berbagai upaya, salah satunya melalui *Diforkin Award*, yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian penghargaan pada satker/uker dalam pembuatan video terkait budaya kerja baru kemenkes yang dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing. Namun, pelaksanaan *Diforkin Award* pada tahun ini terdampak pemblokiran anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan belum dapat direalisasikan hingga akhir Semester I. Akibatnya, capaian output untuk program ini masih nihil pada periode tersebut.

3. Pengelolaan *Newsletter Digital (KOMINT)*

Dalam mendukung Transformasi Sistem Kesehatan agar tersampaikan dan terinternalisasi di lingkungan internal Kementerian Kesehatan, telah disusun inisiatif program *Internal Transformation Office* melalui kegiatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Internal (*Diforkin*). Ada 10 kegiatan di dalam *Diforkin*. Biro Komunikasi dan Informasi Publik turut terlibat dalam 3 kegiatan diantaranya, yaitu melalui 1) newsletter yang akan disebarluaskan melalui email blast, e office dan *WA blast*; 2) kegiatan dengan para pengelola komunikasi internal di masing-masing satker serta 3) mengoptimalkan pemanfaatan media yang saat ini sudah tersedia.

Pada semester I TA 2025, *Newsletter Digital* dikeluarkan dalam bentuk *WA Blast* sementara diseminasinya menggunakan media yang telah ada, seperti Instagram @lifeatkemenkes dan portal E Office.

4. Diseminasi melalui Eksisting Media

Instagram merupakan media sosial ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah YouTube dan Facebook. Instagram dipilih karena terlebih dahulu Biro OSDM telah memiliki instagram yang sudah memiliki 12 ribu *follower*. Selanjutnya akun *existing* ini disepakati untuk digunakan sebagai media sosial penyampai pesan kepada pegawai Kemenkes. Sampai dengan Juni 2025 jumlah *follower* @lifeatkemenkes sebanyak 98.5 ribu *followers*.

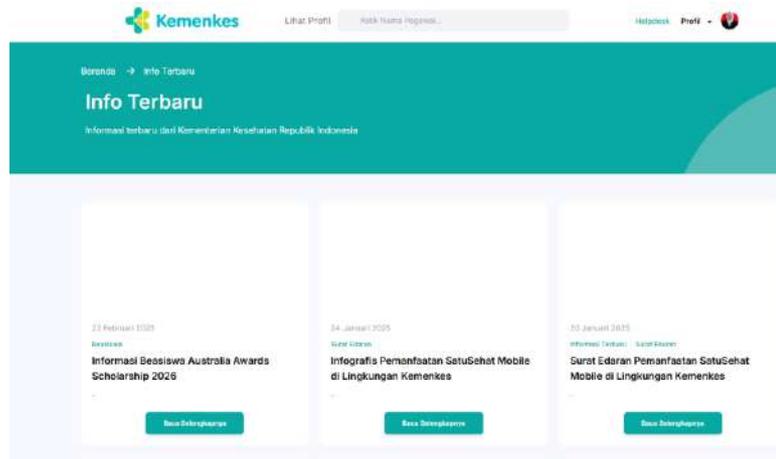
Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengambil peran dalam pembuatan konsep konten, dan penyebarluasannya. Sementara untuk strategi *content pilar* dan *agenda setting* di diskusikan bersama tim Diforkin. Pada periode Januari s.d 23 Juni 2025, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah memposting konten (termasuk kolaborasi) dari akun lain dengan total konten sebanyak 78 konten. Konten pilar dalam akun @lifeatkemenkes dibuat beragam, diantaranya:

- a) Informasi umum kegiatan internal pegawai, ex: Townhall, Kegiatan Ramadhan, Mutasi Internal, dll;
- b) Informasi pengembangan kompetensi pegawai, ex: beasiswa, pelatihan, seminar, dsb;
- c) Informasi Kepegawaian, ex: rekrutmen pegawai;
- d) Monday motivation;
- e) Komik transformasi dan Ber-AKHLAK;
- f) EXIST: Hobi dan Komunitas Pegawai Kemenkes;
- g) CAPSAY cuap cuap santai seputar jabatan fungsional;
- h) konten bincang-bincang bersama pegawai Kemenkes terkait pengalaman maupun informasi bermanfaat lainnya;
- i) Konten kolaborasi bersama unit lain atau UPT;



5. Owned Media (Portal E – Office)

Portal E Office juga menjadi kanal untuk penyebarluasan informasi transformasi kesehatan yang menasar spesifik ASN Kemenkes. Selama semester 1 telah dikeluarkan sebanyak 4 konten informasi



6. Pengelolaan Pertemuan Komunikasi Internal (KOMINT)

Komunikasi internal dan budaya kerja memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memperkuat, di mana kualitas komunikasi internal yang baik dapat mendorong terbentuknya budaya kerja yang sehat, sementara budaya kerja yang positif menciptakan ruang bagi komunikasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan konstruktif. Dalam konteks organisasi publik seperti Kementerian Kesehatan, komunikasi internal bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan alat strategis untuk membentuk persepsi, membangun komitmen bersama, dan menggerakkan perubahan perilaku aparatur sipil negara. Oleh karena itu, kemampuan membangun komunikasi internal yang efektif dan berdampak menjadi krusial dalam mendukung internalisasi tiga tema utama budaya kerja baru yakni eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul. Ketiganya menuntut adanya pemahaman yang seragam, kepemimpinan yang komunikatif, serta sistem kerja yang adaptif terhadap transformasi. Tanpa komunikasi internal yang strategis, proses perubahan budaya kerja akan berjalan lambat, berisiko menciptakan resistensi, dan gagal menanamkan nilai-nilai yang ingin dibentuk secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan Pengelolaan Pertemuan Komunikasi Internal (KOMINT) hingga saat ini belum dapat direalisasikan akibat masih adanya status pemblokiran anggaran pada kegiatan terkait. Pemblokiran ini berdampak langsung pada penghambat pencapaian target output kegiatan pada Semester I tahun berjalan.

7. Pertemuan Humas Kesehatan

Kegiatan pertemuan Humas Kesehatan tahun 2025 di selenggarakan sebagai salah satu bentuk pembinaan bidang kehumasan. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai wadah yang bersifat koordinatif dan strategis untuk penguatan peran humas kesehatan dan meningkatkan hubungan antar humas kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan beserta UPTnya dalam rangka menyatukan langkah strategis kehumasan dalam mengkomunikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat berbagai program dan kebijakan kesehatan di pusat maupun daerah secara cepat, tepat, dan profesional demi terwujudnya pembangunan kesehatan.

Pertemuan Humas Kesehatan yang direncanakan sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi antarunit kehumasan di lingkungan Kementerian Kesehatan hingga saat ini belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran pada pos kegiatan tersebut, yang berdampak langsung pada tertundanya seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan pertemuan, termasuk fasilitasi narasumber, logistik, dan dukungan teknis lainnya.

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

1. Pertemuan Nasional Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan direncanakan sebagai sarana komunikasi antara bidang kehumasan dan kepustakawanan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan, meningkatkan kompetensi serta profesionalisme petugas pelayanan informasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan oleh institusi induknya, yaitu Kementerian Kesehatan. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk membahas berbagai isu, tantangan, dan pengembangan kepustakawanan serta kehumasan secara strategis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Namun, hingga pertengahan tahun 2025, kegiatan ini belum dapat direalisasikan akibat adanya pemblokiran anggaran. Hal tersebut berdampak pada tertundanya seluruh tahapan persiapan, termasuk koordinasi dengan narasumber seperti Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, serta pakar literasi informasi. Selain itu, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dan Perpustakaan Nasional dalam bidang pengembangan penyelenggaraan perpustakaan juga belum dapat dilaksanakan.

2. Pemilihan Perpustakaan Berinovasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Perpustakaan memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dalam sektor kesehatan, termasuk di dalamnya adalah transformasi sistem kesehatan yang tengah berlangsung. Dalam rangka mendukung transformasi sistem kesehatan, Perpustakaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berperan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Perpustakaan Kemenkes adalah menyelenggarakan Pemilihan Perpustakaan Berinovasi 2025 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi, kualitas layanan, serta inovasi dalam mengelola dan menyebarkan informasi kesehatan.

Pada tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penjurian untuk menilai inovasi yang telah diterapkan oleh perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penilaian tersebut menjadi upaya awal untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung budaya kerja baru berbasis pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*). Dengan mengusung tema “Peran Perpustakaan dalam Pengelolaan Knowledge Management dalam Mendukung Budaya Kerja Baru Kementerian Kesehatan,” kegiatan ini mendorong perpustakaan berinovasi demi mendukung transformasi sistem kesehatan.

Namun, pada tahun 2025, kegiatan *Pemilihan Perpustakaan Berinovasi* belum dapat dilaksanakan karena adanya pemblokiran anggaran. Kondisi ini menghambat kelanjutan dari program yang seharusnya menjadi forum apresiasi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan, serta memperlambat upaya institusional dalam mengintegrasikan inovasi pustaka ke dalam sistem transformasi kesehatan nasional.

3. Bimbingan Teknis Perpustakaan

Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan sebagai pernyataan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perpustakaan secara profesional. Instrumen akreditasi tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi. Akreditasi berfungsi untuk mengukur posisi kinerja pengelolaan perpustakaan, meningkatkan citra perpustakaan, serta memperkuat citra lembaga induk. Proses pengajuan akreditasi dilakukan secara daring melalui laman <https://akreditasi.perpusnas.go.id>, dan selanjutnya akan dilakukan penilaian

oleh asesor yang ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional secara daring maupun luring. Selama tahun 2025, beberapa kegiatan bimbingan teknis terkait pendampingan persiapan akreditasi telah dilaksanakan di sejumlah institusi, antara lain BBPK Makassar, RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, Poltekkes Kemenkes Jambi, dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu institusi dalam memahami instrumen akreditasi dan meningkatkan kesiapan teknis serta administratif dalam menghadapi proses akreditasi perpustakaan

4. Diklat Teknis Literasi Informasi Perpustakaan Kemenkes

Bimbingan literasi informasi perlu dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang merubah sumber literasi yang tadinya tercetak berubah menjadi sumber elektronik yang terbuka untuk semua masyarakat yang mengaksesnya. Akses yang terbuka mengakibatkan terjadinya kelimpahruahan informasi sehingga mempersulit pemustaka untuk mendapatkan informasi yang akurat, valid dan relevan. Untuk itu tantangan saat ini, pustakawan tidak hanya sekedar melayani pemustaka membaca dan meminjam buku tapi harus memiliki penguasaan keterampilan literasi informasi untuk diajarkan kepada pemustaka.

Keterampilan literasi informasi adalah kemampuan seorang pustakawan untuk mempelajari atau mengenali informasi yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menemukan kembali informasi tersebut secara efektif dari mulai 1) menganalisa kebutuhan informasi, 2) strategi penelusuran, 3) pendayagunaan informasi, 4) sintesa informasi, dan 5) Etika profesi bidang informasi. Keterampilan literasi informasi dibutuhkan untuk dapat mengerjakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan informasi secara efektif, efisien dan etis.

Keterampilan literasi informasi akan menciptakan sebuah generasi masyarakat berbasis informasi (*Information based society*) yang mampu belajar secara mandiri sepanjang hayat dan berdampak pada kualitas sosial ekonomi dan kultur suatu bangsa.

Keterampilan ini digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan, namun juga dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi. Selain digunakan dalam pelayanan perpustakaan, literasi informasi juga merupakan salah satu kluster komponen uji kompetensi dalam sertifikasi pustakawan.

Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan perpustakaan yang besar terdiri dari berbagai jenis yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada perpustakaan Kemenkes, perpustakaan unit utama, perpustakaan poltekkes, perpustakaan rumah sakit, perpustakaan bapelkes, perpustakaan balai dan loka yang memiliki pemustaka sesuai dengan jenis perpustakaanannya. Begitu besar koleksi dan akses yang dimiliki perpustakaan

di lingkungan Kemenkes maka pustakawan perpustakaan perlu mendapat diklat literasi informasi guna meningkatkan kemampuan untuk memberikan bimbingan literasi informasi kepada pemustaka dan sebagai bekal untuk mengikuti Sertifikasi Literasi Informasi. Kegiatan ini diselenggarakan secara swakelola dan kontraktual oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.



5. Sertifikasi Pustakawan Kemenkes

Sertifikasi Pustakawan merupakan proses standarisasi kompetensi profesi yang dilaksanakan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Kegiatan ini dipandang penting sebagai langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan serta mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kemenkes sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki peran dalam melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap pengembangan kompetensi pustakawan. Salah satu bentuk konkret dari pembinaan tersebut adalah rencana pelaksanaan *sertifikasi kolektif pustakawan* di tahun 2025.

Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan atas kompetensi, tetapi juga menjadi salah satu unsur pendukung dalam proses akreditasi perpustakaan serta bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan. Peserta yang direncanakan mengikuti kegiatan ini adalah pustakawan dari unit kerja yang sedang mempersiapkan akreditasi perpustakaan maupun pustakawan yang berupaya meningkatkan jenjang dan kualitas kompetensinya. Namun, hingga akhir Semester I Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan sertifikasi pustakawan belum dapat direalisasikan karena kegiatan ini telah direncanakan untuk dilaksanakan pada Semester II.

3. Pengelolaan Perpustakaan Kementerian Kesehatan

a) Alih Media

Alih media merupakan salah satu kegiatan yang melekat pada fungsi Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagai Pusat Repository Karya Tulis, Karya Cetak dan Karya Rekam yaitu wajib melaksanakan alih media seluruh konten lokal yang dimiliki Kemenkes untuk menjamin kelestarian isi koleksi. Selain itu di era teknologi, dalam pelayanannya perpustakaan Kemenkes sudah menggunakan aplikasi berbasis otomasi. Menuju era terwujudnya perpustakaan digital, Perpustakaan Kementerian Kesehatan melaksanakan alih media koleksi buku terbitan Kemenkes untuk dijadikan format digital yang dapat terintegrasi dengan aplikasi layanan perpustakaan. Namun, pada tahun 2025 tidak ada pelaksanaan alih media dikarenakan pemblokiran anggaran.

b) Kunjungan Langsung Pemustaka Perpustakaan

Di akhir tahun 2021 Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan khusus dengan standar akreditasi A. Seiring dengan ditetapkannya Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagai Perpustakaan khusus dengan standar A, maka tahun 2022 Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan mulai membuka jam operasional pada pukul 07.00 s/d 16.00 (di hari kerja Senin s/d Kamis), sedangkan 07.00 s/d 16.30 (di hari Jumat), sedangkan hari Sabtu dan Minggu serta libur nasional layanan perpustakaan ditutup untuk pemustaka.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan juga meningkatkan kualitas layanan dengan menjadikan perpustakaan digital. Berbagai aplikasi dikembangkan untuk memberikan layanan kepada pemustaka diantaranya aplikasi inilite, electronic library Kesehatan (E-Likes), repository koleksi perpustakaan dan revitalisasi Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK).

Layanan perpustakaan Kementerian Kesehatan meliputi layanan simpan pinjam koleksi perpustakaan baik melalui kunjungan langsung maupun perpustakaan digital (E-Likes). Perpustakaan Kemenkes juga menyediakan layanan anak dengan memberikan story telling kepada pengunjung anak.

Selain itu, Perpustakaan Kementerian Kesehatan melaksanakan *stock opname*, yaitu melakukan proses pencocokkan data buku yang ada di rak dengan data yang ada di database. Selain *stock opname* Perpustakaan Kemenkes juga melakukan penyiangan (*weeding*) yaitu upaya pengeluaran jumlah koleksi perpustakaan yang sudah dianggap tidak relevan lagi atau *out of date*.

**Tabel Laporan Pengunjung *Offline* Perpustakaan Kemenkes
Bulan Januari – Juni 2025**

Bulan	PNS Kemenkes Aktif	PNS Kemenkes Purnabakti	Masyarakat Umum	Pelajar/ Mahasiswa	Lain- lain	Jumlah
Januari	232	14	17	14	2	276
Februari	179	0	9	14	1	203
Maret	223	0	14	3	5	245
April	97	0	8	7	25	137
Mei	92	16	2	1	1	112
Juni	15	0	4	1	7	26
JUMLAH						999

**Tabel Laporan Pengunjung E-Likes Perpustakaan Kemenkes
Bulan Januari – Juni 2025**

Bulan	Pendaftaran E-Likes	Pengunjung E-Likes	Pembaca E-Likes	Peminjam E-Likes	Jumlah
Januari	185	1.568	435	0	2.188
Februari	140	2.250	507	260	3.157

Maret	163	2.430	449	193	3.235
April	173	2.127	300	191	2.791
Mei	141	2.291	315	167	2.914
Juni	0	0	0	0	0
JUMLAH					14.285

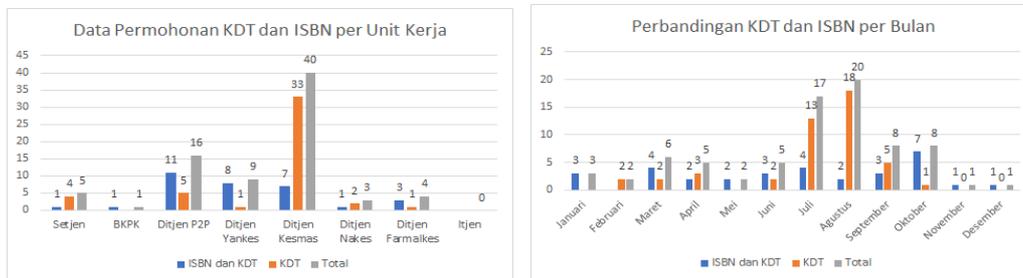
Perlu disampaikan bahwa data yang disajikan merupakan data hingga periode Januari–Mei 2025. Hal ini dikarenakan data bulan Juni masih dalam proses pengolahan dan verifikasi, sehingga belum dapat ditarik secara lengkap pada pertengahan bulan berjalan. Proses pengolahan data Juni memerlukan waktu tambahan guna memastikan akurasi dan kelengkapan informasi sebelum dipublikasikan.

c) Permohonan Katalog dan Terbitan (KDT) dan *International Standard Book Number* (ISBN)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik merupakan Penanggung Jawab dalam Pengajuan Nomor ISBN ke Perpustakaan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Kementerian Kesehatan. Perpustakaan Kementerian Kesehatan merupakan perpanjangan tangan Perpustakaan Nasional dalam menghimpun koleksi nasional. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) merupakan dasar dalam Permohonan KDT dan ISBN.

Pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) juga mengatur persyaratan buku yang boleh mengajukan ISBN antara lain bukan laporan atau buku untuk lingkup kecil suatu institusi harus buku yang sasarannya masyarakat

luas. Beberapa buku Kemenkes ada yang direkomendasikan cetak tanpa ISBN dikarenakan hanya untuk lingkup Kemenkes saja dan termasuk dalam jenis kategori terbitan yang terbit tanpa ISBN misalnya Modul.



Pengajuan permohonan KDT ISBN cukup beragam dari 6 Unit Utama, yaitu Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen P2P, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sekretariat Jenderal dan BKPK. Satuan kerja paling banyak mengajukan permohonan KDT dan ISBN tahun 2024 yaitu Ditjen Kesehatan Masyarakat sebanyak 55 judul dengan rincian 18 judul untuk buku dengan pengajuan KDT ISBN dan 37 judul buku dengan pengajuan KDT saja.

Sebagai informasi semua terbitan Kementerian Kesehatan wajib mencantumkan nomor KDT sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang penerbitan dan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan terbitnya Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) menyebabkan tidak semua terbitan Kementerian Kesehatan memperoleh rekomendasi nomor ISBN oleh Perpustakaan Nasional. Pada Semester I TA 2025, Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah menerima 19 permohonan dengan rincian 6 permohonan e-KDT dan 16 permohonan ISBN KDT.

4. *Pathfinder*, Infografis dan Literasi Informasi Perpustakaan Kemenkes

a. *Pathfinder*

Merupakan panduan yang disusun oleh pustakawan, yang berisikan daftar sumber informasi dalam berbagai bentuk, seperti buku, website, jurnal, jurnal online, bahkan video berdasarkan topik tertentu untuk dapat membantu pemustaka mendapatkan sumber informasi yang tepat mengenai topik tertentu. Pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI, *pathfinder* dibuat dengan berisikan informasi umum tentang topik, buku, artikel jurnal, video dan artikel berita. *Pathfinder* yang dimiliki oleh Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat dalam format pdf dan dapat diakses pada website Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI (<https://perpustakaan.kemkes.go.id/>) dalam tampilan *Flipbook*. *Pathfinder* milik

Perpustakaan Kementerian Kesehatan mengambil topik mengenai hari-hari besar kesehatan, informasi mengenai penyakit & hal kesehatan, serta informasi umum.

b. Infografis

Merupakan sebuah representasi visual dari sebuah informasi atau data yang dibuat menjadi elemen visual. Infografis merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan data atau infografis yang dipadukan dengan berbagai macam objek visual. Fungsi utama dari infografis yaitu membuat audiens tertarik sehingga mereka mau menyimak informasi atau sebuah yang disajikan. Pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat beberapa infografis dan diunggah melalui laman Instagram milik Perpustakaan Kementerian kesehatan RI. Infografis yang diunggah biasanya membahas mengenai hari-hari besar kesehatan serta informasi-informasi kesehatan. Bahan infografis biasa didapatkan melalui koleksi Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dan sumber informasi digital seperti artikel jurnal dan artikel website.

c. Literasi Informasi

Literasi informasi merupakan kemampuan seorang individu untuk mengenali kapan informasi tersebut dibutuhkan serta untuk menemukan, mengevaluasi, efektif menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format. Pustakawan sebagai *The Guardian of Information* harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan dan dapat ditawarkan kepada pustakawan. Literasi informasi pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI merupakan sebuah produk yang dibuat untuk memudahkan pemustaka mendapatkan informasi secara cepat dan sebagai sebuah referensi. Literasi Informasi di Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat dalam bentuk sebuah paket informasi yang berisikan sebuah jawaban umum dari sebuah pembahasan topik beserta informasi mengenai topik tersebut. Adapun tahapan dalam pembuatan literasi informasi yaitu: identifikasi kebutuhan informasi, penelusuran informasi, evaluasi informasi, analisis sintesis dan diseminasi informasi.

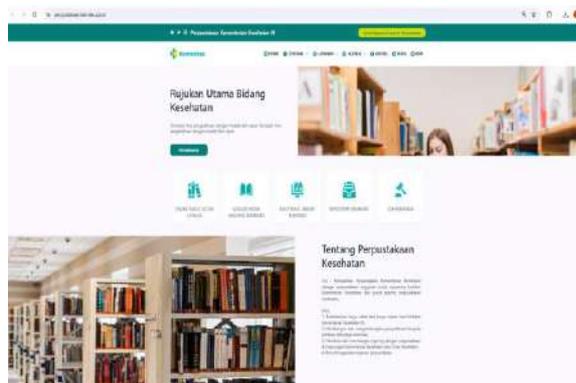
5. Pemeliharaan Aplikasi Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Di era teknologi saat ini Perpustakaan Biro Komunikasi dan Informasi Publik menggunakan aplikasi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada pemustakanya. Untuk menjalankan layanan perpustakaan pada saat ini Biro komunikasi memiliki 1 *server Colocation* dan 3 *server Hosting* di data center milik Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes. Dengan maraknya insiden *cyber* yang terjadi akhir-akhir ini maka setiap aplikasi mutlak harus rutin diperbaharui dan dilakukan proses pencadangan

secara rutin sepanjang tahun mengikuti perkembangan keamanan di bidang pemrograman. Hal ini diperlukan supaya bisa mengurangi dampak resiko insiden keamanan *cyber*. Karena banyaknya faktor dan modul yang harus diperbaharui maka supaya lebih efisien dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tidak tumpang tindih proses. Aplikasi perpustakaan yang dikelola oleh Biro Komunikasi Publik diantaranya:

a. E-Perpustakaan

Website <https://perpustakaan.kemkes.go.id> berisi semua layanan Perpustakaan Kementerian yang dapat diakses publik



b. KINK One Search

KINK One Search merupakan aplikasi pencarian satu pintu untuk OPAC dan *repository* milik masing-masing perpustakaan di lingkungan Kemenkes. Aplikasi ini menyajikan informasi secara up-to-date dan real-time serta dirancang agar mudah diakses dengan aman melalui URL <https://kink.kemkes.go.id/> yang telah disediakan, memastikan kenyamanan dan keandalan bagi pengguna.

c. Aplikasi ISBN

Aplikasi ISBN merupakan aplikasi permohonan pengajuan nomor KDT (Katalog Dalam Terbitan) dan ISBN (International Standard Book Number).

16. Pengolahan Bahan Perpustakaan Kementerian Kesehatan Tahun 2024

Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah pekerjaan mengolah bahan perpustakaan secara profesional dengan sistem yang baku agar mudah ditemukan kembali. Perpustakaan Kementerian Kesehatan menggunakan klasifikasi DDC (*Dewey Decimal Classification*) untuk menentukan nomor kelas suatu bahan pustaka. Sedangkan untuk menentukan tajuk subjek menggunakan *Medical Subject Heading* (Mesh). Sistem pengolahan bahan perpustakaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pengolahan Bahan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Bahan

perpustakaan yang telah diolah menggunakan sistem yang baku selanjutnya diinput (*entry*) kedalam sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi. Perpustakaan Kemenkes menggunakan INLIS (*Integrated Library System*) Lite. Inlislite merupakan perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpunas sejak tahun 2011. INLISLite dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan.

Koleksi perpustakaan Kementerian Kesehatan diperoleh dari dua sumber utama, yaitu melalui pembelian dan hibah. Kedua sumber ini secara rutin memperkaya ragam dan kedalaman koleksi yang tersedia bagi pemustaka, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Namun, pada tahun 2025, tidak terdapat kegiatan pengadaan atau pembelian bahan pustaka baru karena adanya pemblokiran anggaran pada pos terkait. Kondisi ini berdampak pada tidak tersedianya alokasi anggaran untuk penambahan koleksi baru melalui pembelian. Sebagai langkah adaptif, pengolahan bahan perpustakaan tahun 2025 difokuskan pada koleksi eksisting. Kegiatan pengelolaan mencakup penataan ulang katalog, digitalisasi terbatas, serta optimalisasi penempatan dan pemanfaatan koleksi yang telah tersedia. Upaya ini dilakukan untuk tetap menjaga kualitas layanan dan ketersediaan informasi, sekaligus memastikan bahwa koleksi yang ada dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna perpustakaan.

INDIKATOR PENDUKUNG LAINNYA

Adapun selaku unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Biro Komunikasi dan Informasi Publik turut berkontribusi dalam menunjang pencapaian Sasaran Strategis Indeks Tata Kelola Kementerian Kesehatan. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung prinsip-prinsip good governance, keterbukaan informasi publik, serta penguatan kualitas pelayanan. Capaian kinerja Biro dalam mendukung sasaran strategis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indeks Tata Kelola Kemenkes Yang Baik					
No	Indeks Tata Kelola Kemenkes yang Baik	Target 2025	Capaian Semester 1	% Capaian TW 1	Keterangan
1	Nilai Reformasi Birokrasi	90,01	91,71	101,89%	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi i
2	Nilai Kerja Anggaran	80,01	53,67	67,08%	Nilai Kinerja Anggaran Kemenkes berda
3	Indeks Integritas Organisasi	78	0	0,00%	Thn 2026 akan terbit pada awal tahun.
4	Laporan Keuangan	4	4	100,00%	Terbit Opini pada TW2
5	SAKIP	90	90,7	100,78%	SAKIP Serketarait Jenderal
6	Persentase capaian award kehumasan Ke	4	2	50,00%	Mendapatkan 2 penghargaan
7	Indeks Tata Kelola Kemenkes yang Baik			69,96%	

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja

- a) Kepastian pengesahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029
- b) Kelengkapan sarana dan prasarana, termasuk Studio Siaran Radio, Studio Podcast, *Smartphone*, Laptop, PC, Kamera Video, alat rekaman, serta aplikasi berbayar seperti Freepik, Canva, dan Capcut.
- c) SDM di divisi komunikasi, terdiri dari ASN, PPNPN, dan kontrak perorangan.
- d) Dukungan pimpinan terhadap program kerja serta kualitas pelayanan publik.
- e) Tingkat koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja dan lembaga.
- f) Program dan kebijakan terbaru dari Kementerian Kesehatan sebagai bahan publikasi.
- g) Sumber pemberitaan/narasumber dari Menteri Kesehatan, Wakil Menteri, hingga profesional kesehatan eksternal.
- h) Dukungan pustaka melalui promosi literasi, aplikasi perpustakaan (Inlislite), dan penyediaan referensi pegawai.
- i) Stabilitas produksi konten melalui tambahan SDM dari BKO dan program magang.
- j) Sumber daya anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

2. Permasalahan

- a) Beban kerja dan mobilitas tinggi dengan jumlah SDM yang terbatas
- b) Kendala operasional seperti perlengkapan yang kurang memadai (*LCD screen*, *sound system*, kursi narasumber).
- c) Pemblokiran anggaran di seluruh unit kerja Kementerian Kesehatan yang menyebabkan sebagian besar kegiatan terhambat
- d) Kurangnya koordinasi antarunit kerja dan lembaga, menghambat penyampaian informasi.
- e) Komitmen pimpinan unit pelayanan publik (UPP) dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang masih rendah.
- f) Rendahnya budaya pelayanan prima di UPP.
- g) SDM yang tidak memadai untuk produksi konten digital, termasuk minimnya kapasitas video editing dan desain grafis.
- h) Perubahan kebijakan yang cepat memerlukan kesiapan tim selama 24/7 hari.
- i) Keterbatasan teknologi pendukung seperti perangkat lunak dan perangkat keras.
- j) Sulitnya menetapkan jadwal sosialisasi bersama DPR.
- k) Pengelolaan konten media sosial dan Instagram lifeatkemenkes tidak dilakukan oleh tim yang didedikasikan khusus.

- l) Rekomendasi survei IKM 2024 belum sepenuhnya diimplementasikan

3. Pemecahan masalah

- a) Menyesuaikan lokasi prioritas kegiatan dengan anggaran yang tersedia.
- b) Meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan Kementerian/Lembaga terkait untuk penilaian IAR berikutnya.
- c) Mengintegrasikan akun media sosial di lingkungan kantor pusat Kemenkes untuk efisiensi.
- d) Melibatkan program magang dengan spesifikasi tertentu (film, *video editing*, desain komunikasi visual) untuk membantu produksi konten.
- e) Mengadakan workshop untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang konten media digital.
- f) Merekrut SDM tambahan untuk produksi konten dan melengkapi sarana pendukung seperti HP atau kamera.
- g) Meningkatkan komitmen pimpinan UPP untuk mendukung peningkatan layanan publik.
- h) Mengadopsi teknologi baru, pelatihan staf, dan budaya kerja yang mendukung komunikasi efektif.

4. Rencana Tindak Lanjut

- a) Melakukan perekrutan SDM melalui ASN dan program magang.
- b) Mengembangkan kompetensi melalui pelatihan teknis (pengambilan gambar, editing, desain grafis).
- c) Memetakan kegiatan yang dapat diubah metode pelaksanaannya untuk menyesuaikan kondisi anggaran
- d) Memperbaiki infrastruktur teknologi dan logistik.
- e) Mengadakan bimtek dengan efisiensi biaya
- f) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja untuk mendukung komunikasi yang lebih efektif.
- g) Melakukan advokasi pesan transformasi kepada pengelola komunikasi internal di Kemenkes.

INOVASI KINERJA

***Grand Design* Pelayanan Publik dan Perpustakaan Kementerian Kesehatan**

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik saat ini tengah menyusun *Grand*

Design Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Dokumen ini dirancang sebagai panduan strategis jangka menengah-panjang untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih adaptif, inklusif, partisipatif, dan berbasis data. Penyusunan grand design ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh inisiatif dan kebijakan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam satu kerangka yang sistematis, termasuk memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan, memperluas kanal layanan, dan mendorong budaya pelayanan yang berorientasi pada pengguna.

Selain itu, *Grand Design Pelayanan Publik* juga diharapkan menjadi dasar dalam pengembangan inovasi pelayanan yang bersifat lintas unit dan lintas wilayah. Dengan pendekatan ini, Kementerian Kesehatan dapat memastikan adanya keselarasan antara kebutuhan masyarakat, kebijakan nasional, dan kapasitas institusi dalam memberikan layanan kesehatan yang unggul. Saat ini, proses penyusunan dokumen tersebut masih berlangsung, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal kementerian maupun mitra eksternal, guna menjamin relevansi dan efektivitas pelaksanaannya di masa mendatang.

Di sisi lain, Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga sedang menyusun *Grand Design Perpustakaan Kementerian Kesehatan.* Dokumen ini akan menjadi peta jalan transformasi layanan perpustakaan, yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan koleksi, tetapi juga pengembangan literasi kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan yang terbuka dan kolaboratif. Penyusunan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya pustakawan, modernisasi sistem katalog dan sirkulasi, serta meningkatkan aksesibilitas publik terhadap koleksi digital maupun fisik.

Grand Design Perpustakaan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Kesehatan secara lebih efektif. Dalam proses penyusunannya, Biro juga memperhatikan standar nasional perpustakaan, rekomendasi dari Perpustakaan Nasional, serta praktik-praktik baik dari institusi sejenis. Saat ini, penyusunan masih berada dalam tahap perumusan kerangka konsep dan pengumpulan data awal sebagai landasan penyusunan kebijakan dan rencana implementasi ke depan.

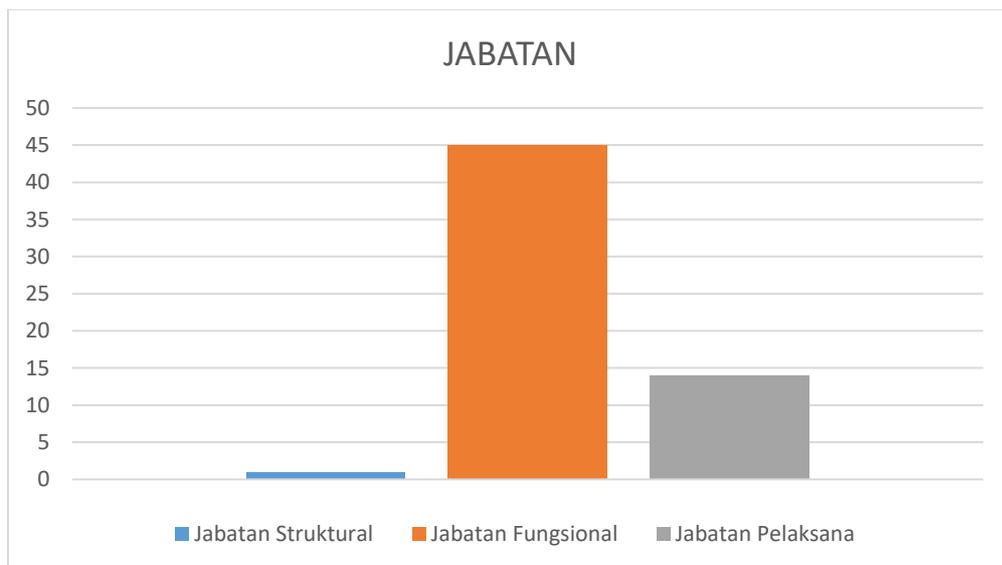
D. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keadaan Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal sampai dengan Juni 2025 berjumlah 60 orang, dengan rincian sebagai berikut :

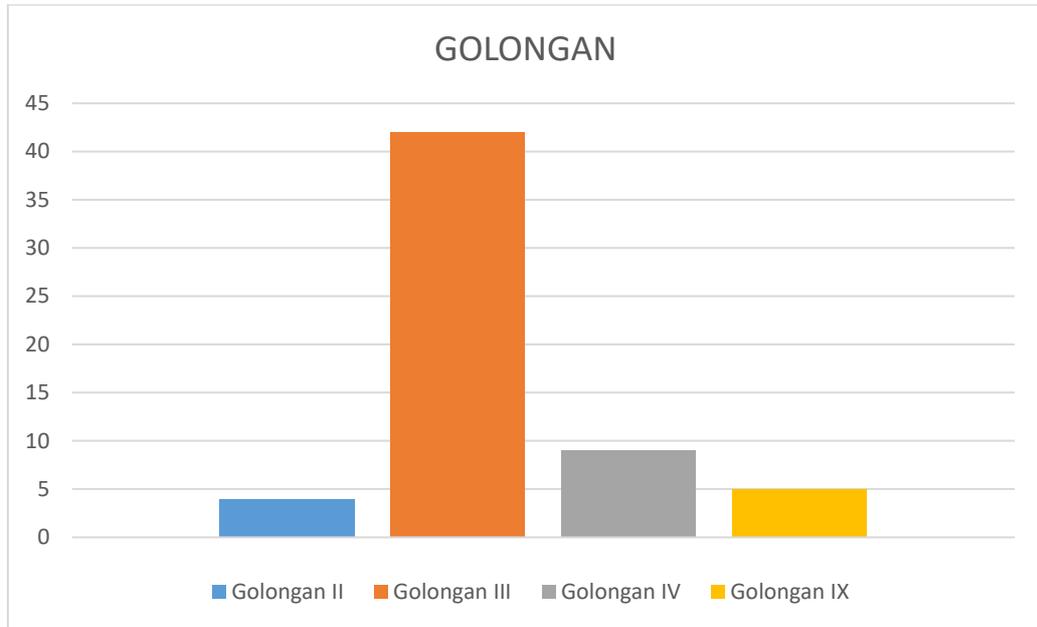
a. Menurut Jabatan:

1) Jabatan Struktural	:	1	orang
2) Jabatan Fungsional	:	45	orang
- Pranata Humas	:	32	orang
- Pustakawan	:	5	orang
- Pranata Komputer	:	1	orang
- Perencana	:	1	orang
- Arsiparis	:	2	orang
- Keuangan	:	4	orang
3) Jabatan Pelaksana	:	14	orang



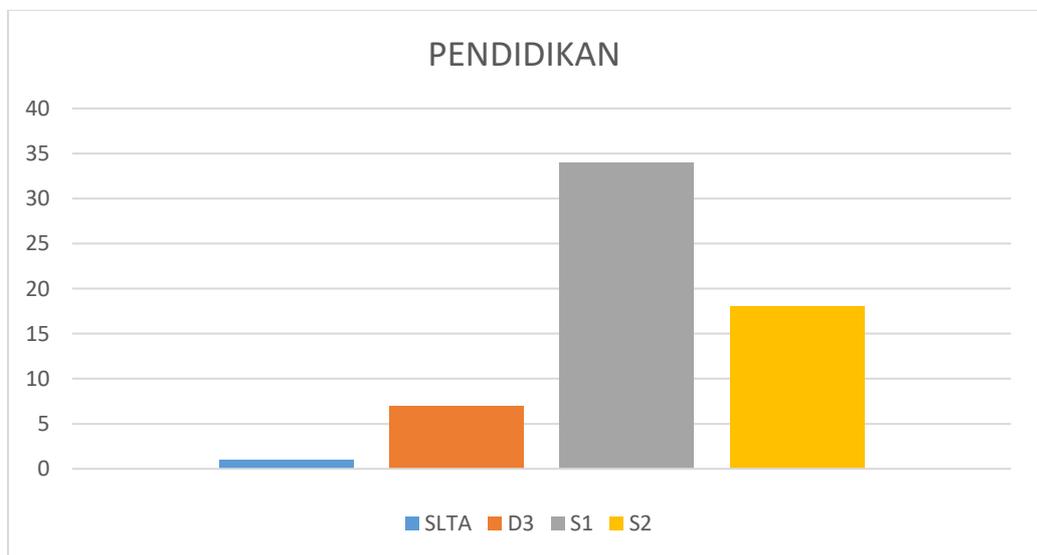
b. Menurut Golongan:

1) Golongan II	:	4	orang
2) Golongan III	:	42	orang
3) Golongan IV	:	9	orang
4) Golongan X	:	5	orang



c. Menurut Pendidikan:

- 1) SLTA : 1 orang
- 2) D3 : 7 orang
- 3) S1 : 34 orang
- 4) S2 : 18 orang



Berikut beberapa daftar pelatihan yang diikuti oleh pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I Tahun 2025, antara lain :

**DAFTAR PELATIHAN SEMESTER I TAHUN 2025
BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**

No.	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
1.	Prawito, SKM, MM	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan SDM dalam rangka Penguatan Regulasi dan Advokasi Hukum di Bidang Kesehatan Batch 18	21 Februari 2025
2.	Prawito, SKM, MM	Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	3 Maret 2025
3.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	NGOPI ASN (Ngobrol Pintar ASN) Kemenkes Seri 3 Membuat Desain Program Pengembangan Kompetensi	27 Februari 2025
4.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
5.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	3 Maret 2025
6.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Komunitas Belajar Administrator Kesehatan seri 3	12 Maret 2025
7.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025
8.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Global Learning Connect	14 – 16 Maret 2025

9.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Bedah Buku Pedoman Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2025	20 Maret 2025
10.	Subkhan, S.Pd, MM	Open Class (AP Corner) Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025	27 Februari 2025
11.	Eka Purnamasari, S.Si	Webinar PusbinTalk Series #18: Sosialisasi Aplikasi Pendaftaran & Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana	30 Januari 2025
12.	Eka Purnamasari, S.Si	<i>Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) "Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan" Tahun 2025</i>	5 Februari 2025
13.	Eka Purnamasari, S.Si	<i>Webinar Ekonomi Digital dan Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan</i>	17 Februari 2025
14.	Eka Purnamasari, S.Si	<i>Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan</i>	28 Februari 2025
15.	Eka Purnamasari, S.Si	<i>Sosialisasi Kebijakan Fungsional Perencana dan Kompetensi Jabatan Fungsional</i>	4 Maret 2025
16.	Eka Purnamasari, S.Si	<i>Global Learning Connect</i>	14 – 16 Maret 2025

17.	Eka Purnamasari, S.Si	<i>Bedah Buku Pedoman Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2025</i>	20 Maret 2025
18.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	<i>Kursus Cara Membuat Karyawan Lebih Produktif 3X Lipat dari Hendra Hilman International</i>	16 Januari 2025
19.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Kursus Saya Pasti Bisa dari Merry Riana Group	16 Januari 2025
20.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
21.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	3 Maret 2025
22.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025
23.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Global Learning Connect	14 - 16 Maret 2025
24.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Workshop Pengembangan Kompetensi Bidang Informasi Teknologi Dasar Untuk Media Sosial Seri 1 Tips Mengelola Media Sosial Instansi Pemerintah yang Kekinian	19 Maret 2025

25.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Bedah Buku Pedoman Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2025	20 Maret 2025
26.	GALIH PERMANA, SE, MKM	Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) "Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan" Tahun 2025	5 Februari 2025
27.	GALIH PERMANA, SE, MKM	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I Tahun 2025	24 Februari 2025
28.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Pemanfaatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional: Mewujudkan ASN yang Berdaya Saing Global	20 Februari 2025
29.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Implementasi Sistem Manajemen K3 Sebagai Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	27 Februari 2025
30.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Puasa dan Etos Kerja ASN	27 Februari 2025
31.	Kartika Indra S, S.Kom	NGOPI ASN (Ngobrol Pintar ASN) Kemenkes Seri 3 Membuat Desain Program Pengembangan Kompetensi	27 Februari 2025

32.	Kartika Indra S, S.Kom	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
33.	Kartika Indra S, S.Kom	Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	3 Maret 2025
34.	Kartika Indra S, S.Kom	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025
35.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Flexible Working Arrangement (FWA): Antara Efisiensi dan Kinerja	13 Maret 2025
36.	Kartika Indra S, S.Kom	Global Learning Connect	14 – 16 Maret 2025
37.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Work Life Balance: Kinerja Tinggi - Bahagia Sejati	20 Maret 2025
38.	Endang Tri Widiyastuti, A.Md	Seminar Nasional Peran Record Center Arsip Dalam Meningkatkan Keamanan dan Aksesibilitas Data	17 Januari 2025
39.	Endang Tri Widiyastuti, A.Md	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025

40.	Endang Tri Widiyastuti, A.Md	MMOC Pemberkasan Arsip Secara Elektronik Untuk Arsiparis di Kemenkes RI Batch 2	14 – 31 Maret 2025
41.	Reiza M. Iqbal, A.Md	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
42.	Reiza M. Iqbal, A.Md	Global Learning Connect	14 – 16 Maret 2025
43.	Mochamad Nur Prasetyo, A.Md.Ak	Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) “Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan” Tahun 2025	5 Februari 2025
44.	Nida Khairani, A.Md.Ak	Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) “Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan” Tahun 2025	5 Februari 2025
45.	Mauliana Asri, S.Sos	MOOC E-Learning Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Level 3 Batch 2	10 Februari – 31 Maret 2025
46.	Mauliana Asri, S.Sos	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025

47.	Mauliana Asri, S.Sos	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025
48.	Mauliana Asri, S.Sos	Webinar Hari Pendengaran Sedunia, Changing Mindsets Empower Yourself Make Ear and Hearing Care A Reality For All	13 – 20 Maret 2025

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam mencapai kinerja, Biro Komunikasi dan Informasi Publik didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA – 024.01.1.465921/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan alokasi sebagai berikut:

Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Refocusing (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
29.247.665.000	10.339.097.000	18.908.568.000	1.720.526.690	16.64

Sejalan dengan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, proporsi anggaran terbesar dialokasikan tiap tahunnya untuk alokasi sasaran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal unit kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Semester I Tahun 2024			Semester I Tahun 2025		
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	38.432.897.000	24,188,364,707	68.27	10.339.097.000	1.720.526.690	16.64
---	----------------	----------------	-------	----------------	---------------	-------

Realisasi Anggaran Semester I TA 2025
Tabel Rincian Realisasi Anggaran per Output

Program	Output	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen, Kegiatan, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	314.000.000	46.422.500	14.78
	Layanan Hubungan Masyarakat	10.025.097.000	1.674.104.190	16.70

Pagu yang bisa digunakan sebesar 10.339.097.000 dikarenakan ada *Automatic adjustment* sebesar Rp 18.908.568.000

**MATRIKS TARGET KINERJA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023-2025**

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	T	R	T	R	T	R
				2023	2023	2024	2024	2025	2025
1	Pengelolaan komunikasi publik dan informasi publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi	83	B06: 88,20 B12: 89,36	83	B06: 89,3 6 B12: 90,1 7	83	0
			Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	37	46	40	44	40	0

Indikator Kinerja Kegiatan pertama yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi* menunjukkan tren capaian yang konsisten melampaui target. Pada tahun 2023, target ditetapkan sebesar 83, sementara capaian semester I (B06) mencapai 88,20 dan capaian tahunan (B12) sebesar 89,36. Tahun 2024 juga mencerminkan kinerja yang positif, dengan capaian B06 sebesar 89,36 dan B12 mencapai 90,17, melampaui target yang tetap di angka 83. Pencapaian ini menandakan bahwa upaya pengelolaan komunikasi publik berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan dua tahun berturut-turut.

Namun, pada tahun 2025 belum terdapat realisasi capaian atas indikator dikarenakan terdapat perubahan indikator kinerja di lingkup Biro Komunikasi dan Informasi Publik

dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yang menyebabkan tertundanya pelaporan dan pelaksanaan evaluasi atas indikator ini. Kondisi ini menandai adanya masa transisi kebijakan yang turut memengaruhi kontinuitas data kinerja Biro.

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan kedua, yaitu jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan, juga menunjukkan pencapaian positif selama dua tahun terakhir. Tahun 2023 ditargetkan 37 UPT, namun realisasinya melampaui target dengan capaian 46 UPT. Tren positif ini berlanjut pada 2024 dengan target 40 UPT dan capaian 44 UPT. Untuk tahun 2025, indikator ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari pengukuran kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Namun, saat ini prosesnya masih dalam tahap survei lapangan dan belum terdapat data realisasi. Diharapkan target akan tercapai pada Triwulan III (TW III) tahun 2025, seiring selesainya proses pengumpulan dan validasi data di lapangan.

3. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsi satuan organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Biro Komunikasi dan Informasi Publik terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor. Berdasarkan Data pada Neraca Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2025, nilai sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam akun neraca dapat dijelaskan dibawah ini:

Neraca BMN Biro Komunikasi dan Informasi Publik SEMESTER I TAHUN 2025

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - SUB SATKER
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 024010199465921035KP KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL

Tgl.Data : 23/06/25 6:25 AM
Tgl.Cetak : 23/06/25 12:10 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_subsatker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	106,067,737
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	9,712,500
132111	Peralatan dan Mesin	12,973,817,258
135121	Aset Tetap Lainnya	768,870,030
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11,766,179,784)
162151	Software	380,417,936
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(380,417,936)
J U M L A H		2,092,287,741

**Daftar Peralatan dan Mesin di Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Per 30 Juni 2025**

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	370.689.100
2	3020104001	Sepeda Motor	1	14.810.000
3	3020201004	Lori Dorong	2	3.850.000
4	3030205002	Tool Kit Box	1	3.300.000
5	3030301064	Memori Programmer	5	10.878.000
6	3040104004	Lemari Penyimpanan	1	1.650.000
7	3050103007	Mesin Fotocopy Folio	1	46.411.500
8	3050104001	Lemari Besi/Metal	18	87.312.638
9	3050104002	Lemari kayu	62	328.538.300
10	3050104003	Rak Besi	2	187.437.250
11	3050104004	Rak Kayu	7	51.150.000
12	3050104007	Brandkas	1	6.600.000
13	3050104016	Roll Opek	1	40.700.000
14	3050104020	Lemari Display	1	2.201.000
15	3050105007	CCTV – Camera Control Television System	3	32.703.000
16	3050105015	Alat Penghapus Kertas	5	3.676.500
17	3050105038	Laser Pointer	2	26.276.500
18	3050105048	LCD Projector/Infocus	6	96.754.900
19	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	11	108.570.000
20	3050201002	Meja Kerja Kayu	4	21.610.000
21	3050201003	Kursi Besi/Metal	193	395.575.695
22	3050201004	Kursi Kayu	2	15.800.000
23	3050201005	Sice	8	22.000.000
24	3050201008	Meja Rapat	35	133.951.000
25	3050201014	Meja Resepsionis	3	16.972.000
26	3050201019	Meja Makan Kayu	2	5.280.000
27	3050201021	Pot Bunga	3	5.610.000
28	3050201028	Workstation	70	585.526.000
29	3050201999	Meubelair lainnya	3	14.080.000
30	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.692.800

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
31	3050204001	Lemari Es	4	13.370.500
32	3050204003	A.C. Windows	1	9.570.000
33	3050204004	A.C. Split	9	106.634.000
34	3050206002	Televisi	33	1.046.771.180
35	3050206007	Loudspeaker	2	11.779.416
36	3050206008	Sound System	3	58.523.600
37	3050206012	Wireless	8	252.556.750
38	3050206014	Microphone	14	60.358.000
39	3050206019	Stabilisator	1	3.496.500
40	3050206020	Camera Video	7	191.927.000
42	3050206034	Tangga Aluminium	1	588.500
42	3050206036	Dispenser	7	18.583.400
43	3050206057	Vertikal Blind	1	17.737.500
44	3060101003	Audio Mixing Stationer	3	99.680.520
45	3060101008	Audio Monitor Active	2	14.307.500
46	3060101022	Telephone Hybrid	1	8.827.500
47	3060101036	Microphone/Wireless MIC	13	214.341.600
48	3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	28.700.000
49	3060101075	Digital Audio Storage System	1	21.890.000
50	3060101088	Voice Recorder	23	29.755.420
51	3060102003	Camera Electronic	8	37.280.000
52	3060102016	Video Switcher	2	35.090.000
53	3060102024	Video Processor	1	16.500.000
54	3060102034	Teleprompter	1	3.885.000
55	3060102045	Tripod Camera	10	34.577.250
56	3060102060	Camera Film	2	67.712.600
57	3060102061	Lensa Kamera	15	418.426.100
58	3060102118	Head Set	36	49.933.478
59	3060102120	Lighting Head Body	6	22.327.300
60	3060102121	Lighting Mechanic	4	44.568.700
61	3060102128	Camera Digital	17	747.787.100
62	3060102129	Tas Kamera	2	3.221.750

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
63	3060102130	Lampu Blitz Kamera	8	53.519.000
64	3060102158	Monopod	2	3.509.500
65	3060102164	Video Splitter	1	11.384.100
66	3060102167	Drone	1	35.000.000
67	3060102170	Gimbal Tripod	1	1.998.000
68	3060102999	Peralatan Studion Video dan Film Lainnya	3	34.268.750
69	3060199999	Alat Studio Lainnya	3	3.135.000
70	3060201001	Telephone (PABX)	3	125.954.600
71	3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	123.527.273
71	3060201003	Pesawat Telephone	1	39.600.000
72	3060201004	Telephone Mobile	24	261.104.330
73	3060201006	Handy Talky	3	6.072.000
74	3060201010	Facsimile	3	5.425.000
75	3060201019	PDA	2	38.072.100
76	3060310999	Pelatan Antena SHF/Parabola lainnya	1	47.650.000
77	3070102032	Braket Holder	1	1.500.000
78	3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	1	20.000.000
79	3080111137	Tripod	10	51.031.650
80	3080112025	Stabilizer	2	8.436.000
81	3080153053	Laboratory Air Conditioner 1.50 HP	2	26.911.500
82	3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	2	6.050.000
83	3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	40.805.000
84	3080715005	Lighting Equipoment	5	21.851.000
85	3090403062	TEA Tile II Headset with PTT	14	5.823.224
86	3090405010	Digital Signature Pad	2	3.660.000
87	3090407009	Batery Pack Camera (Yang Bisa Diisi Ulang)	3	7.920.000
88	3100102001	P.C Unit	112	2.050.093.335
89	3100102003	Note Book	64	1.182.046.292
90	3100102009	Tablet PC	1	21.756.600
91	3100201012	Hard Disk	31	87.038.350
92	3100202001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	4	8.214.000

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
93	3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	2	12.890.000
94	3100202015	Auto Switch/Data Switch	5	14.744.400
95	3100202017	Speaker Komputer	2	3.289.000
96	3100203002	Monitor	7	30.200.000
97	3100202003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44	225.536.630
98	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	39.058.800
99	3100203017	External Portable Hardisk	3	25.549.000
100	3100204001	Server	14	1.423.492.677
101	3100204006	Repeater dan Transciever	1	93.500.000
102	3100204009	Card Punch	1	7.425.000
103	3100204024	Switch	1	57.673.000
104	3100204029	Mobile Modem GSM/CDMA	2	27.775.000
105	3100204038	Wireless IP Camera	2	54.000.000
106	3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	2	4.125.000
107	3110201009	Decocer/DE 200	3	90.489.300
108	3150405006	Air Conditioning (AC)	9	156.873.200
109	3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	6	26.620.400
110	3170122014	Microwave Heater	1	1.498.500
111	3170124001	Rolling Machine	1	6.875.000
112	6010101001	Monografi	2396	537.650.080
113	6010101999	Buku Lainnya	4	9.435.000
114	6010201001	Kaset	588	151.883.700
115	6010201003	CD/VCD/DVD/LD	805	36.901.250
116	6010301999	Bahan Kartografi lainnya	1	33.000.000
117	8010101001	Software Komputer	3	380.417.936
Total			4.913	14.094.459.824

Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Per 30 Juni 2025

No	No.Kendaraan	Tahun	Jenis / Merk	Keterangan
----	--------------	-------	--------------	------------

1	B 1307	FQ	2006	Toyota Innova	Kendaraan Operasional
2	B 1107	SQP	2013	Toyota Veloz	Kendaraan Operasional

Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Per 30 Juni 2025

No.	No.Kendaraan	Tahun	Jenis/Merk	Keterangan	
1.	B 611	SQP	2008	Honda Supra X 125	Operasional Subbag Adum

Dalam hal pengelolaan BMN selama Semester I Tahun 2025, Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Pengadaan BMN

Sejak Semester I Tahun 2025, pengadaan BMN pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik dilakukan oleh Biro Umum. Biro Komunikasi dan Informasi Publik baru menerima 1 (satu) unit printer dengan nilai perolehan Rp. 21.928.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang tertuang di Berita Acara Serah Terima Barang.

Penghapusan/Lelang BMN

Semester I Tahun 2025 Biro Komunikasi dan Informasi Publik belum melakukan Penghapusan/Lelang BMN.

B. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Kementerian/Lembaga agar melakukan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut berdampak pada ketentuan dalam penghematan/efisiensi dimana Kementerian/Lembaga agar melakukan identifikasi rencana belanja sesuai besaran efisiensi yang telah ditentukan.

Tahun 2025 pagu alokasi Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik sebesar Rp29.247.665.000, penghematan/efisiensi (blokir) sebesar Rp21.847.885.000, pagu efektif sebesar Rp7.399.780.000. Ketetapan penghematan ini sudah termasuk blokir Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya (Kode A). Dengan penghematan anggaran yang tersedia harus dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel untuk kebutuhan 1 tahun anggaran.

Dengan alokasi pagu efektif yang telah ditetapkan, mengakibatkan Biro Komunikasi dan Informasi Publik perlu menentukan kegiatan yang mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan terkait dukungan publikasi dalam komunikasi dan informasi publik.

Rincian revisi anggaran yang dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025 yaitu:

- a) Revisi DIPA DJA ke-1 tanggal 21 Februari 2025, mengenai blokir/efisiensi anggaran tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi sebesar Rp21.847.885.000 dari pagu anggaran Rp29.247.665.000 sehingga pagu efektif yang dapat di gunakan Rp7.399.780.000
- b) Revisi DIPA Kanwil ke-2 tanggal 12 Maret 2025, mengenai revisi kegiatan advokasi pembiayaan Kesehatan yang berhubungan dengan Sosialisasi Kesehatan pada Masyarakat kegiatan ini bersama mitra Komisi IX DPR RI terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp2.927.200.000 dari pagu sebelumnya Rp29.247.665.000 menjadi Rp32.174.865.000 sehingga pagu efektif yang dapat di gunakan Rp10.326.980.000
- c) Revisi POK ke-4 tanggal 12 April 2025 revisi optimalisasi belanja barang dan jasa, pergeseran anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi dan informasi publik, sehingga pagu anggaran tetap Rp32.174.865.000 sehingga pagu efektif yang dapat di gunakan Rp10.326.980.000
- d) Revisi DIPA Kanwil ke-6 tanggal 04 Juni 2025, mengenai revisi anggaran antar kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal untuk memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Masyarakat, Survei IKP (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes) dan Advertorial, terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp2.658.667.000 dari pagu sebelumnya Rp32.174.865.000 menjadi Rp34.833.532.000 sehingga pagu efektif yang dapat di gunakan Rp12.985.647.000

Besaran Pagu anggaran Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun anggaran 2025, sebesar Rp 34.833.532.000 penghematan/ efisiensi (blokir) sebesar Rp 21.847.885.000 pagu efektif sebesar Rp12.985.647.000 dengan realisasi Rp 1.743.580.795 dan persentase 13,43%.

e. Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Kegiatan TA 2025

PROGRAM	OUTPUT	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	314.000.000	46.422.500	14,78
	Layanan Hubungan Masyarakat	12.671.647.000	1.697.158.295	13,39
		12.985.647.000	1.743.580.795	13,43

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan pekerjaan dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan seperti tenaga, waktu dan biaya tetapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau target yang ingin dicapai, maka akan dinilai efisiensi.

Dalam mendukung dan melaksanakan Program Dukungan Manajemen Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, berikut analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I Tahun 2025 terurai dalam tabel dibawah ini :

Target Output	Pagu Anggaran (PAKi)	Realisasi Anggaran (RAKi)	Capaian Keluaran (Cki)	E
100%	Rp 12.985.647.000	Rp 1.743.580.795	29,15%	53,94%

Efisiensi Sumber Daya Anggaran untuk setiap capaian Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat dihitung sebagai berikut:

Rumus Efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus efisiensi yang digunakan, hasil perhitungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik menunjukkan angka efisiensi sebesar **53,94%**. Artinya, keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan dengan tingkat penghematan anggaran sebesar 53,94% dari total anggaran yang seharusnya dibutuhkan berdasarkan capaian output yang direncanakan. Angka ini mencerminkan bahwa biro mampu memanfaatkan anggaran secara efisien, di mana realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran yang dikalikan dengan capaian output. Meskipun ini merupakan indikator efisiensi yang cukup baik, penting untuk memastikan bahwa efisiensi ini tidak

mengorbankan kualitas keluaran (output) atau berdampak negatif terhadap hasil (*outcome*) yang diharapkan.

a) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi SDM, diperoleh nilai efisiensi sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang masih 0% pada Semester I Tahun Anggaran 2025, meskipun realisasi anggaran telah mencapai 16,64% dan terdapat ketimpangan antara jumlah *eksisting* SDM (60 pegawai) dengan kebutuhan ideal SDM (100 pegawai).

Belum tercapainya capaian IKK ini dipengaruhi oleh adanya perubahan indikator kinerja pada tahun 2025 seiring dengan transisi ke Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 yang hingga saat ini belum disahkan. Ketiadaan dasar perencanaan yang *definitif* tersebut menyebabkan beberapa kegiatan strategis belum dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk pengukuran capaian kinerja melalui survei kepuasan masyarakat.

Sementara itu, untuk IKK terkait jumlah UPT dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan publik, yang sudah menjadi bagian dari indikator Renstra 2022–2024, saat ini masih dalam tahap pelaksanaan survei lapangan. Kegiatan ini direncanakan selesai dan hasilnya diharapkan dapat terealisasi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, efisiensi SDM masih berpotensi meningkat seiring progres kegiatan yang berlangsung pada semester berikutnya.

2. Analisis atas penggunaan anggaran terhadap capaian output kegiatan

Dalam mendukung dan melaksanakan Program Dukungan Manajemen Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, berikut analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I tahun 2025 terurai dalam tabel dibawah ini :

Kode & Nama Keluar	Volume	Pelaksanaan (% Realisasi)
00 2042.004.000	160.0 Kegiatan	91.2%
00 2042.004.000.01	17.0 Kegiatan	91.2%
00 2042.004.000.02	1.0 Kegiatan	90.7%
00 2042.004.000.03	2.0 Kegiatan	97.0%
00 2042.004.000.04	40.0 Lini	95.7%
00 2042.004.000.05	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.06	11.0 Kegiatan	95.2%
00 2042.004.000.07	2.0 Kegiatan	95.0%
00 2042.004.000.08	1.0 Kegiatan	95.0%
00 2042.004.000.09	1.0 Kegiatan	95.0%
00 2042.004.000.10	1.0 Kegiatan	95.0%
00 2042.004.000.11	4.0 Kegiatan	95.0%

00 2042.004.000.12	2.0 Kegiatan	95.0%
00 2042.004.000	902.0 Kegiatan	90.4%
00 2042.004.000.01	30.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.02	30.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.03	30.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.04	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.05	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.06	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.07	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.08	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.09	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.10	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.11	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.12	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.13	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.14	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.15	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.16	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.17	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.18	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.19	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.20	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.21	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.22	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.23	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.24	1.0 Kegiatan	90.0%

00 2042.004.000.25	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.26	1.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.27	5.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.28	4.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.29	2.0 Kegiatan	90.0%
00 2042.004.000.30	2.0 Kegiatan	90.0%

3. Matriks Sandingan antara Capaian Output dengan Realisasi Anggaran

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN			
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian
07	KESEHATAN	34,833,532,000.00	1,606,514,715.00	4.61%				
90	KESEHATAN LAINNYA	34,833,532,000.00	1,606,514,715.00	4.61%				
WA	Program Dukungan Manajemen	34,833,532,000.00	1,606,514,715.00	4.61%				
2042	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	34,833,532,000.00	1,606,514,715.00	4.61%				
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8,869,736,000.00	46,422,500.00	0.52%				
060	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	8,869,736,000.00	46,422,500.00	0.52%	160.0000	Layanan	4.0000	14.77%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25,963,796,000.00	1,660,092,215.00	6.01%				
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	25,963,796,000.00	1,660,092,215.00	6.01%	392.0000	Layanan	45.0000	14.38%

Berdasarkan uraian pada tabel, persentase realisasi anggaran (RA) Semester I Tahun 2025 untuk kegiatan Pelayanan Publik Lainnya khususnya pada *suboutput* Penguatan Pengelolaan Layanan Publik sebesar 0,52%, dengan realisasi fisik berupa realisasi volume *output* (RVO) sebanyak 4 layanan dari target 160 layanan, atau setara dengan 14,77% progress capaian. Sementara itu, untuk kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, persentase RA tercatat 6,01%, dengan realisasi *output* sebesar 45 layanan dari target 392 layanan, yang berarti progress capaian fisik baru 14,38%.

Jika dibandingkan, terlihat bahwa persentase capaian *output* (RVO) pada kedua kegiatan telah melampaui persentase serapan anggaran (RA) yang relatif masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan anggaran masih minim, kegiatan telah memberikan *output* yang cukup signifikan. Namun, kondisi ini juga perlu dicermati, mengingat adanya kemungkinan *mismatch* antara serapan anggaran dan *output* yang dihasilkan, yang dapat berdampak pada ketepatan alokasi biaya pada semester berikutnya.

Dengan kondisi di atas, maka diperlukan penguatan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di semester berikutnya, baik dari sisi perencanaan teknis maupun penyerapan anggaran. Keseimbangan antara realisasi anggaran dan volume *output* perlu dijaga untuk memastikan efisiensi pelaksanaan program, sekaligus meminimalisasi risiko penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran yang dapat menurunkan kualitas belanja dan *output* pelayanan publik secara keseluruhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Kesimpulan

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I TA 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung pembangunan kesehatan dan khususnya kegiatan pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan Publik. Terkait dengan Indikator Kinerja Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik, terdapat perubahan yang masih dalam proses pengesahan pada dokumen Rencana Strategis TA 2025-2029.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki target dan realisasi sebagai berikut:

- a) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) I: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi dengan target 83
- b) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) II: Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam pelaksanaan dengan target 40 UPT

Adapun terkait dengan apresiasi atas kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik, unit kerja mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:

- a) Gold Winner Kategori Pelayanan Publik pada Makaravox PR Award yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia
- b) Penghargaan sebagai instansi teraktif dalam mengamplifikasikan narasi tunggal oleh Kementerian Komunikasi dan Digital

Keberhasilan yang telah dicapai merupakan langkah awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja di atas, rencana tindak lanjut Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan perekrutan SDM melalui ASN dan program magang.
- b) Mengembangkan kompetensi melalui pelatihan teknis (pengambilan gambar, editing, desain grafis).
- c) Memetakan kegiatan yang dapat diubah metode pelaksanaan kegiatannya untuk menyesuaikan kondisi anggaran
- d) Memperbaiki infrastruktur teknologi dan logistik.
- e) Mengadakan bimtek dengan efisiensi biaya
- f) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja untuk mendukung komunikasi yang lebih efektif.
- g) Melakukan advokasi pesan transformasi kepada pengelola komunikasi internal di Kemenkes.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Semester I Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode pelaporan. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait belum disahkannya Renstra 2025–2029 dan pemblokiran anggaran pada beberapa kegiatan strategis, Biro tetap berkomitmen untuk menjaga kinerja dan kualitas layanan melalui langkah-langkah adaptif dan kolaboratif. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan strategi perbaikan berkelanjutan di semester berikutnya guna mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kesehatan secara lebih optimal dan akuntabel.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK**

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik*)	86
I. Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan*)	90,01
		Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal*)	96%
1. Kegiatan: Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengelolaan publikasi komunikasi dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi	83
		Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40
		Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal*)	80,1
		Realisasi Anggaran Unit kerja	96%
		Kualitas Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR	Baik
		Survei Kepuasan Masyarakat	87,50

		Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Kualitas Tinggi

*) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik sebagai *Supporting Unit*

Kegiatan

Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik

Anggaran

Rp. 29.247.665.000

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Pihak Pertama
Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Publik,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha



Aji Muhawarman